

BIDIK

NASIONAL

SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

Miss Indonesia 2010 Diduga Terima Uang Tersangka Korupsi Pertamina

JAKARTA, BN - Miss Indonesia 2010 Asyifa Syafningdyah Putriambami Latief diduga menerima aliran dana dari tersangka kasus korupsi Pertamina. Kejaksaan Agung menyebut Asyifa belum mengembalikan uang yang ia terima terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero). Asyifa diduga menerima aliran dana dari salah satu tersangka korupsi Pertamina tersebut.



Miss Indonesia 2010 Asyifa. (ist)

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

PROYEK HOTMIX MOJOAGUNG- MOJODUWUR BERBAU KORUPSI

❑ Kontraktor Diduga Orang Dekat Pejabat PUPR Jombang

JOMBANG, BN - Khususnya masyarakat jombang sebagai penerima manfaat dari pembangunan nasional agar turut memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya, contoh seperti pengerjaan proyek jalan hotmix Mojoagung - Mojoduwur, Kabupaten Jombang. Masyarakat atau warga sekitar harus teliti pada pengerjaan proyek tersebut, kita bisa lihat lebih teliti apa benar bisa jangka panjang dari kualitas bangunan proyek jalan hotmix tersebut, karena penggunaan uang rakyat jangan sampai di buat asal - asalan.

PROYEK yang dikerjakan oleh CV. DEA CELFINTA yang diduga milik salah satu pejabat di Jombang yang sudah purna ini yang ber-

alamat di Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek, dengan Nomor Kontrak 620/1/415.18/2025 Tanggal 17 Januari 2025 dengan Konsul-

tan CV. MEDIA PRIMA KONSULTAN dengan anggaran Rp.4.955.064.872.00. Diduga pada pengerjaannya patut menjadi sorotan publik, hal ini diketahui oleh tim Bidik Nasional (BN) pada saat pengerjaan proyek sedang berada di lokasi.

Proyek pembangunan tersebut sudah selesai dikerjakan dan juga terpasang papan informasi kegiatan. Namun dalam pengerjaannya, proyek tersebut mulai dari awal pengerjaannya diduga tidak sesuai spesifikasi.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Awal dugaan urukan pertama digunakan tanah dari lahan pertanian



Gumakan molen, adukan luluh di dasar tanpa alas (tempat adukan)



Papan Proyek tidak menyebutkan Volume/RAB, Keterbukaan Informasi Publik dikesampingkan



Tataan batu diduga masih ada rongga dan batu lama yang masih digunakan (dipasang kembali)

Direktur PT Kembang Kenongo Property Ditetapkan Tersangka Korupsi TKD Sidokerto



Tersangka EBS, Direktur PT Kembang Kenongo Property.



Kasi Pidus Kejari Sidoarjo, John Franky Yanafia. (Teddy)

SIDOARJO, BN - Perkembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penjualan tanah aset desa (Tanah Kas Desa/TKD) Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, terus bergulir. Kali ini,

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

UPT PPP Tamperan Gelar Tindak Lanjut Koordinasi Zonasi Kapal dengan Stakeholder



Kegiatan tindak lanjut koordinasi terkait zonasi kapal dengan berbagai stakeholder yang digelar UPT PPP Tamperan. (ist)

PACITAN, BN - Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan ketertiban aktivitas perkapalan di Pelabuhan UPT PPP Tamperan, dilakukan tindak lanjut koordinasi terkait zonasi kapal dengan berbagai stakeholder. Kegiatan ini melibatkan pihak pengelola area pelabuhan, perwakilan nelayan, pemilik kapal, serta instansi terkait guna menyusun kesepakatan bersama terkait zona sandar dan operasional kapal di wilayah Pelabuhan, 19/02/2025 lalu.

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya yang menyoroti perlunya penataan zonasi kapal guna mengurangi potensi konflik serta meningkatkan keselamatan dan kelancaran operasional. Dalam kesempatan ini, para peserta membahas sejumlah aspek teknis, termasuk pembagian area tambat kapal berdasarkan jenis dan ukuran, jalur keluar-masuk kapal, serta aturan operasional yang harus dipatuhi oleh seluruh pengguna pelabuhan.

Kepala UPT PPP Tamperan, Muh. Imam Subekti, menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pelabuhan yang lebih tertib dan kondusif bagi seluruh pihak. "Kami berkomitmen untuk mengakomodasi kebutuhan semua stakeholder dengan tetap mengutamakan keselamatan dan

efisiensi operasional. Zonasi yang jelas akan membantu menghindari kesalahpahaman serta meningkatkan produktivitas di pelabuhan," ujarnya.

Selain itu, perwakilan nelayan dan pemilik kapal turut menyampaikan masukan serta harapan mereka terkait implementasi kebijakan zonasi ini. Mereka mengapresiasi langkah yang dilakukan UPT PPP Tamperan dan berharap adanya sosialisasi lebih lanjut agar semua pihak memahami serta mematuhi aturan yang telah disepakati.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan pemetaan lebih rinci serta sosialisasi kepada seluruh pengguna pelabuhan. Diharapkan dengan adanya kesepakatan ini, operasional kapal di Pelabuhan UPT PPP Tamperan dapat berjalan lebih tertib dan efisien, mendukung aktivitas perikanan serta perekonomian masyarakat setempat. (dkp/adv)



Kasek SMAN 1 Jombang Diduga Salah Gunakan Kekuasaan Lakukan Pungli

❑ Dyah Ayu Akui Ada Pungutan Dalam Bentuk Sumbangan untuk Keperluan Sekolah

JOMBANG, BN - Pungli (Pungutan liar) adalah perilaku koruptif yang perlu dilawan. Sehingga pungli di sekolah-sekolah tersebut membuat akses pendidikan menjadi lebih mahal. Tidak menutup kemungkinan pungli dapat mengakibatkan putusnya akses warga terhadap pendidikan. Lebih parah lagi, pungli di sekolah dapat membuat peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa semakin akrab dengan perilaku koruptif.

Seperti yang terjadi adanya dugaan "Pungli" di SMA Negeri 1 Jombang. Informasi yang di terima sumber Bidik Nasional (BN), bahwa sejumlah wali murid mengeluh dengan adanya dugaan pungli, seperti untuk uang gedung Rp 2,5 juta serta SPP Rp 150 ribu perbulan.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Kepala sekolah SMA Negeri 1 Jombang Dyah Ayu Endrianingih, S.Pd, MM. (ist)



Ketua MKKS SMAN Jombang Budiono (ist)

Anggaran Kegiatan Disporapar Jombang Terindikasi Manipulasi

JOMBANG, BN - Disporapar (Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata) Kabupaten Jombang patut di sorot terkait penggunaan anggaran kegiatan tahun 2025. Dugaan adanya ketidak beresan pada penggunaan anggaran tersebut patut menjadi penelitian bagi warga Jombang, khususnya masyarakat Jawa timur. Terutama pada anggaran untuk publikasi diduga ada manipulasi.

Kepala Disporapar Bambang Nurwijanto ketika dikonfirmasi mengatakan, "Itu sudah benar penggunaan nya. Publikasi itu macam macam, bukan hanya untuk wartawan saja," ujarnya kepada Bidik Nasional (BN) dengan nada sinis.

Hasil laporan yang diterima BN, "Nggak masuk akal acara kenduri durian aja di Wonosalam, desa setempat juga membantu dari swadaya warga. Jadi kalau dianggarkan jadi ringan Disporapar Jombang, terus sisa anggaran nya kemana," komentar salah satu warga Wonosalam yang dekat dengan area acara kenduri durian tersebut.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Kantor Disporapar (Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata) Kabupaten Jombang. (Foto: ist)

LOWONGAN WARTAWAN

Koran BIDIK NASIONAL membutuhkan Wartawan yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Peminat bisa kirim lamaran ke Jl. Ikan Lele 2/Ci14 Bluru Permai, Bluru Kidul, Sidoarjo atau Hubungi Bos EDY (HP/WA: 08123209649) email : bidiknasional@yahoo.com

Heri Achmadi Kades Trosobo Nonaktif Didakwa Pungli PTSL Rp 277 Juta



Heri Achmadi (berpeci), Kades Trosobo nonaktif pasca dengarakan dakwaannya. (Foto: ist)

SIDOARJO, BN - Kepala Desa (Kades) Trosobo nonaktif, Heri Achmadi, resmi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Sedati, Sidoarjo, Jumat (2/5) kemarin. Ia didakwa melakukan pungutan liar (pungli) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023.

Dalam sidang yang beragenda pembacaan dak-

waan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, I Putu Kisnu Gupta, mengungkapkan bahwa Heri Achmadi melakukan pungutan terhadap 1.438 warga dengan dalih berbagai biaya tambahan, seperti pengurusan dokumen, pengeringan lahan, dan kebutuhan administrasi lainnya.

"Warga diminta membayar Rp 150 ribu per orang, ditambah dengan permin-

taan untuk menyediakan patok dan materi secara mandiri. Namun, penggunaan uang tersebut tidak jelas," ujar JPU I Putu Kisnu Gupta di hadapan majelis hakim.

Tak hanya itu, sebanyak 20 warga yang ingin mengubah status lahannya dari zona hijau menjadi lahan kering agar dapat dibangun juga diminta membayar pungutan tambahan hingga Rp 2,5 juta per orang. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Sertifikat tanah tetap tercatat sebagai lahan hijau. "Total pungutan dari program pengeringan lahan mencapai Rp 50 juta. Warga kecewa karena sertifikat tidak berubah status meski telah membayar," imbuhnya.

Secara keseluruhan, JPU menyebutkan bahwa uang pungutan yang dikumpulkan Heri mencapai Rp 277 juta. Dana tersebut tidak

digunakan sebagaimana mestinya dan diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatannya, Heri Achmadi didakwa melanggar Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia juga dijerat dengan Pasal 11 Undang-Undang yang sama, yang mengatur tentang tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Selain Heri, JPU juga menyebut nama Sari Dia Ratna, anggota panitia PTSL Desa Trosobo, yang diduga terlibat dalam praktik pungli ini. Namun, perkara Sari ditangani secara terpisah. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa Heri Achmadi. (Teddy Syah Roni)

Komisi A DPRD Sidoarjo Kawal Kasus Tanah Warga Desa Sidomulyo Krian



Warga Desa Sidomulyo Krian saat hearing dengan Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo. (yah)

SIDOARJO, BN - Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo mengawal H. Kaspan warga Sidomulyo kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo. H.Kaspan melalui kuasa hukumnya H.Heru Handono, SH, MH, meminta persyaratan mengurus sertifikat tidak dilayani akhirnya mengajukan permohonan mediasi dengan pemerintah desa Sidomulyo.

Rapat hearing yang digelar komisi A DPRD kabupaten Sidoarjo di hadiri oleh ketua komisi A, H.Riza Ali faizin M.Pd.I., ADIEL Muhamad Kanantha wakil komisi A, sekretaris Raymond Tara wahyudi ST. Elok suciati SH, Bambang Riyoke SE Drs H.Syaifudin M. Pdi, Achmad Muzaiyyin safrolo. Acara hearing digelar di lantai 2 ruang rapat komisi gedung DPRD kabupaten Sidoarjo, pada Kamis 8/5 pukul 13.00 WIB.

Acara dibuka oleh sekretaris komisi A DPRD kabupaten Sidoarjo Raymon Tara wahyudi langsung mempersilahkan kuasa hukum Kaspan yaitu H. Heru Handono menceritakan persoalannya, pada 17 Desember 2024 H.Kaspan bersama Kuasa hukumnya datang ke kantor kepala desa Sidomulyo kecamatan krian untuk minta surat buat melengkapi persyaratan mengurus baliknama surat tanah dari pak Sulaiman ke H Kaspan tapi tdk ketemu kepala desa. "Pada tanggal 20 Desember kembali lagi mendatangi kantor kepala desa, ditemui kepala desa. Tapi kepala desa menjawab tidak bisa melayani karena di buku kretek desa tidak ada pemilik tanah yang bernama Sulaiman dan obyek tanah yang di maksud juga tidak," jelas H. Heru Sudomo, SH., MH.

Masih kata Heru Sudomo, padahal ada surat lampion yang di tanda tangani kepala desa yang sudah almarhum, bahwa tanah tersebut milik H. Kaspan dan Tanah tersebut sudah di kusai oleh H.kaspan selama 32 th dan tidak ada masalah atau tidak ada yg menggugat, kata Heru Sudomo, SH, MH.

Ibnu Malik pj kepala desa Sidomulyo menjelaskan, kalau yang namanya Sulaiman pemilik tanah tersebut tidak ada di desa Sidomulyo dan obyek pbyek yang maksud oleh H.Kaspan itu tidak ada di lokasi yang dimaksud .H.Kaspan, "Oleh sebab itu saya tidak mau melayani,saya anggap itu urusan tidak bimar, kalau urusan yang benar dan jelas ya saya layani," jelas Ibnu Malik.

Sekretaris Komisi A DPRD kabupaten Sidoarjo menyampaikan kepada kedua belah pihak agar supaya dikumpulkan di balai desa oleh kepala desa dan semua orang - orang yang ada kaitannya dengan riwayat tanah tersebut untuk mencari solusi pungkasnya. Setelah rapat selesai, kuasa hukumnya yaitu H.Heru Sudomo, SH, MH, waktu dikonfirmasi menjelaskan, "Kami berharap segera dikumpulkan semua untuk mencari solusi, tapi kalau tidak ada solusi kami akan mengambil langkah hukum," jelas Heru. (yah)

KLB Askab PSSI Sidoarjo Diwarnai Kontroversi, 5 Calon Dicoret Tanpa Alasan Jelas

SIDOARJO, BN - Gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Sidoarjo memicu kontroversi setelah lima nama calon ketua dan anggota Komite Eksekutif (Exco) yang sebelumnya dinyatakan lolos verifikasi, tiba-tiba dicoret tanpa alasan jelas oleh Komite Banding.

Lima nama yang mendadak dieliminasi tersebut merupakan tokoh penting dalam dunia sepak bola Sidoarjo, termasuk Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Kadispora) Sidoarjo, Yudhi Iryanto. Empat nama lainnya adalah Suyitno, Setiyono, Achmad Sodarini, dan Syaiful Arif.

Pencoretan ini memicu kekecewaan dari para pemilik klub yang memiliki hak suara dalam KLB. Ibnu Hambal, pemilik Klub dan SSB Bintang Putra yang juga mantan Sekretaris PSSI Sidoarjo, menyampaikan protes keras terhadap keputusan Komite Banding.

"Sebagai pemilik klub yang punya hak suara, saya prihatin dengan proses KLB ini. Keputusan mencoret lima calon yang sebelumnya lolos verifikasi sangat janggal dan tidak disertai alasan yang transparan," ungkap Ibnu dengan nada geram.

Ibnu juga menyoroti tidak adanya proses klarifikasi terhadap para calon yang dicoret. Menurutnya, kelima calon tersebut tidak pernah dipanggil untuk menjelaskan atau melengkapi berkas. "Ini namanya belum bertanding, sudah dikalahkan. Harusnya biarkan voter yang menentukan, bukan dicoret sepihak," tegasnya.

Keputusan Komite Banding ini juga dinilai bertentangan dengan statuta PSSI. Selain itu, perubahan jadwal KLB yang tiba-tiba dimajukan dari akhir April ke Sabtu, 10 Mei 2025, menambah kecurigaan bahwa ada proses yang tidak sehat dalam pelaksanaannya.

Salah satu calon yang dicoret, Suyitno, juga mengaku tidak pernah mendapatkan kejelasan terkait pencoretan namanya. "Saya hanya pernah ditanya soal berkas asli, dan saya jawab semua sudah saya serahkan ke komisi pemilihan," ujarnya bingung.

Senada dengan Suyitno, Setiyono yang juga menjadi korban pencoretan mengungkapkan bahwa dirinya disebut terlambat mendaftar selama 25 menit. Namun ia membantah alasan tersebut karena saat datang, tidak ada petugas pendaftaran yang standby. Bahkan, menurutnya, ada calon lain yang mendaftar lebih lambat tapi tetap diterima.

Merespons kejanggalan tersebut, sebanyak 11 klub/SSB pemilik hak suara melayangkan surat mosi tidak percaya kepada Askab PSSI Sidoarjo, Asprov PSSI Jawa



Ibnu Hambal bersama Suyitno dan Setiyono saat menunjukkan surat mosi tidak percaya. (Teddy)

Timur, hingga PSSI Pusat. Mereka menuntut pergantian Komite Pemilihan dan Komite Banding sebelum KLB digelar.

Mosi tidak percaya ini ditandatangani oleh sejumlah klub, antara lain Tunas Jaya Tulangan, Pesawad, Akademi Talenta Muda, Trisula, dan Putra Jabon. Mereka menyatakan keberatan atas pelaksanaan KLB yang dianggap melanggar statuta.

"Mosi ini sudah kami kirim ke PSSI Pusat. Jika KLB tetap digelar besok, saya tidak akan hadir karena tidak ingin ikut melanggar aturan," tegas Ibnu.

Sementara itu, dikutip dari rekan media, Ketua Komite Banding pemilihan Askab PSSI Sidoarjo, Agoes Soeseno, menyampaikan bahwa pencoretan 5 calon pengurus tersebut bukan tanpa alasan.

Dia menegaskan, bahwa komite banding pemilihan dalam menetapkan calon tetap ketua, wakil ketua, dan anggota komite eksekutif Askab PSSI Sidoarjo berdasarkan hasil rapat yang dihadiri ketua dan wakil ketua serta anggota komite banding pemilihan.

Berdasarkan hasil telaah dan kajian mendalam serta verifikasi maupun klarifikasi terhadap beberapa personal, keabsahan persyaratan administrasi. Keabsahan administrasi berupa surat asli, dan ketentuan yang tercantum dalam Formulir A-1 termasuk kriteria wajib yang ditandatangani oleh bakal calon diatas materai.

"Komite banding pemilihan melakukan pemeriksaan banding karena ada pengaduan dan keberatan dari para ketua SSB/club anggota Askab PSSI Sidoarjo," tutupnya.

Dari informasi yang didapat, pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Askab PSSI Sidoarjo akan digelar sore ini, 10 Mei 2025. Acara ini dikabarkan bakal digelar lebih cepat dari rencana awal yang ditetapkan. (Teddy Syah Roni)

Eksepsi Pasutri Sidoarjo Penjual Ginjal, Pengacara: Pendana Seharusnya Juga Tersangka



Terdakwa Pasutri selepas persidangan. (Teddy)

SIDOARJO, BN - Sepasang suami istri asal Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, diadili atas dugaan keterlibatan dalam sindikat perdagangan ginjal internasional. Ayu Wardhani Sechathur (29) dan Achmad Farid Hamsyah (32) kini menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Dalam sidang lanjutan pada Rabu (7/5), pasangan tersebut menyampaikan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo. Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Supolo Setyo Wibowo, menyatakan kliennya keberatan karena hanya diposisikan sebagai pelaku lapangan dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Menurut Supolo, kejahatan TPPO tidak bisa dilakukan sendiri. Ia menegaskan bahwa kliennya hanyalah bagian kecil dari jaringan besar yang melibatkan aktor intelektual dan penyandang dana. "Klien kami menilai dakwaan tidak adil karena TPPO adalah kejahatan berjejaring. Tidak mungkin pelaku lapangan bisa bertindak sendiri tanpa peran pihak lain yang lebih dominan, termasuk penyedia dana," kata Supolo selepas sidang.

Ia menyoroti nama Siti Nurul Haliza alias Nunu, warga Makassar, yang disebut dalam berkas perkara sebagai penyandang dana perjalanan ke India. Namun, Nunu hanya berstatus sebagai saksi.

"Ini yang kami pertanyakan. Bagaimana mungkin kejahatan seperti ini terjadi tanpa dukungan dana? Di berkas perkara disebutkan dana berasal dari SN, tapi kenapa dia tidak dijadikan tersangka?" lanjutnya.

Supolo menyebut pihaknya akan menghadirkan ahli pidana dalam persidangan berikutnya. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa penyandang dana juga harus bertanggung jawab secara hukum. "Kami akan hadirkan ahli pidana untuk membuktikan bahwa pembiaya tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Semua unsur dalam jaringan ini harus diproses," tegasnya.

Ayu dan Farid didakwa melanggar Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Mereka juga dijerat dengan dakwaan subsider berdasarkan Pasal 432 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan tindak pidana dan penyertaan.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim D. Herjuna Wisnu Gautama akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan dari JPU. (Teddy Syah Roni)

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

BIDIK
NASIONAL

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

PEMIMPIN UMUM : Pudji Leksono. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB : Edy Sutanto. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Teddy Syah Roni. PENASEHAT HUKUM : Yustinus Haryanto, SH. REDAKTUR PELAKSANA : Budi Santoso. REDAKTUR : A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhsan, Agus. TIM LIPUTAN KHUSUS : Toddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto. JAWA TIMUR : SURABAYA : Dymas Marufi Santoso, Abd Rossi, Ninik Rachmawati. SIDOARJO : Nur Yahya. GRESIK : Ariadi AM. PAMEKASAN : Ainur Halis. SUMENEP : Adi Yusman, Ishak. SAMPANG : Hollilurrahman. MOJOKERTO : Husnan. JOMBANG : Totok Agus Hariyanto (Kabiro), Devi Setyorini. NGANJUK : Agung Moch. Suhada, Sugianto, Dodik Andiyanto. KEDIRI : Nyoto Dharmawan. TULUNGAGUNG/TRENGGALEK : Nik Atin. MADIUN : Basuki. NGAWI : Leo Lunardi T. MAGETAN : Ashar AR. PONOROGO : Andy Wijaya. LAMONGAN : Syaiful Anam, Sulistiowati, Arif Mustofa, Joko Santoso. BOJONEGORO : Priyanto. MALANG RAYA : Nino

Wiwantara. BLITAR : Budi Sastro. PASURUAN : Toddy Pras Hendarto, PROBOLINGGO/LUMAJANG : Sonny Narwani. JEMBER : Agus Budiono. SITUBONDO : Agung Chomelis (Kabiro), Hari Sulistyono. BONDOWOSO : Rukwandanu. BANYUWANGI : Djoni DW (Kabiro), Surtipito, Sugeng Purnomo. JAWA TENGAH : BLORA : Mugianto (Kabiro), Tiono Indah Handayani, Ali Mustofa, Nurcahyanto. REMBANG : Didik Eko Sulistiawan. WONOGIRI : Heryanto. SEMARANG RAYA : Peni Kusumawati (Kabiro), Catur Prasetyo. PEKALONGAN RAYA : Sodikin (Kabiro), M. Khairul Anwar. BATANG : Rudiono (Kabiro), Bambang Hadi. KENDAL : Peni Kusumawati, Doni Kurniawan. KUDUS : Budi Setiawan. GROBOGAN : Heru Budianto. SALATIGA : Susilo Haryadi. BOYOLALI : Hendardi. TEMANGGUNG : Ahmad Mukhlis (Kabiro), Novan Argunanto. JAWA BARAT : CILACAP : Asep Saepudin (Kabiro), Suyatno, Carsono Adi Paulana. MAGELANG : Mamo, ST. BANDUNG : Zaenal Ikhsan (Kabiro). CIAMIS/KOTA BANJAR/PANGANDARAN : Asep Sujana. SUMEDANG : Ernawan Hidayat. SUBANG : Tohir (Kabiro), Sumantri, Anay, Kandiawan, Ahmad Saehu. INDRAMAYU : Candra Shema Restullah (Kabiro), Ragil Pangestu. DEPOK : Harahap (Kabiro), Fajar. BEKASI : Abdul Rachman. KUNINGAN : Edwar Panata Muda. PURWAKARTA : Anthon Pontoh, Endin. BOGOR : Liswandi (Kabiro), Wardiyansyah Saputra, Firdaus. JAKARTA/BANTEN : Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. BALI : Agung Wiarto. SULAWESI SELATAN : SOPPENG/WAJO : Anwar Paturusi (Kabiro). PINRANG : Moh Sabir (Kabiro), Subhan Hapid. BONE : Eddy Suspi AB. SULAWESI UTARA : Hilda Pusung. MANADO : Affandi Masloman. KOTAMOBAGU/BMR : Arman Muna (Kabiro), Moh Setio Wanoto. GORONTALO : Riffy Tama'un. HALMAHERA SELATAN : Anwar Suleman. KALIMANTAN TENGAH : MURUNG RAYA/BARITO UTARA : Effendi (Kabiro). KALIMANTAN BARAT : Sofyan Hadi. KETAPANG : Sukarto. KALIMANTAN UTARA : Syamsudin (Kabiro). KEPRI : BENGKALIS : Agung Mulyono. KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN : Handoko KEP NATUNA : Amir Hamzah. RIAU : Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). SUMATERA SELATAN : PALEMBANG : Siriani. LAHAT/MUARA ENIM : Adi Nurahman. PAGAR ALAM : Marleo Tanjung. OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN : M Azhary MY, OKU TIMUR : Nelis Sri Wahyuni. OKI : Nurli Oktari. SUMATERA UTARA : KOTA MEDAN : Muhammad Syaefi Harahap. LABUHANBATU : M. Sukma (Kabiro). PAKPAK BHARAT : Tennang Tumangger (Kabiro), Dariono. DELI SERDANG : Heri Siswoyo. ASAHAN : Tumin P, Sandro Natanael Hulu, Hengky Ames. NIAS UTARA : Hadirat Syukur Harefa. NIAS BARAT : Odaligo Zai. TAPANULI SELATAN : Amir Hamzah Nasution SUMATERA BARAT : PASAMAN : Suryadarma (Kabiro), Refdinal. LAMPUNG : WAY KANAN : Arye M Jahri. LAMPUNG TIMUR : Nuhyin, Mueshin, Antoni. LAMPUNG UTARA : Eka Saputra (Kabiro), Triyutika Sari LAMPUNG SELATAN : Muhammad Fahreza Khibran Wibowo. LAMPUNG BARAT / PESISIR BARAT : M. Taufik TULANG BAWANG/TULANG BAWANG BARAT : Indra Wijaya, Hendra Jaya. PRINGSEWU : Iskandar. B. BANDAR LAMPUNG : Suhartono Hariwibowo. TANGGAMUS : - NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES : Sutrisno (Kabiro), Simson Sitepu. SUBULUSSALAM : Agus Darminto Bancia (Kabiro), Imran Cibro. ACEH SINGKIL :Roni Syehrani (Kabiro), Nurhalmah. BIREUM : Hendra S. BANGKA BELITUNG : Agusman Sirait (Kabiro), Tamrin. JAMBI, TANJUNG JABUNG BARAT : Joni Effendi. NUSA TENGGARA BARAT : MATARAM : Hidayatul Aini (Kabiro). PAPUA : Junjungan Silalahi. LAYOUT/TIT Nur Hayati PEMASARAN/ADMINISTRASI/KEUANGAN : Dita Zahra Amalia. PENERBIT : PT Bidik Nasional Pers (BNP). AKTE NOTARIS : LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014. SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015. AKTE NOTARIS PERUBAHAN : Iwan Saleh Irawan, SH, No 02 Tgl 4 Februari 2020. SK MENKUMHAM PERUBAHAN : No AHU-0010003.AH.01.02. Tahun 2020 NOMOR INDIK BERUSAHA (NIB) BERBASIS RESIKO : 0220105231819. NPWP : 72.007.891.4-617.000. ALAMAT : Jl. Ikan Lele 2 Blok Ci No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Kode Pos 61233. JAKARTA : Jl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210, Telp. 021-53661085. BANK : Rek Giro BRI Cabang Sidoarjo No. 0086-01002254-30-8/ Rek Giro Bank Jatim Cab Sidoarjo No. 0261050731 An PT Bidik Nasional Pers. WEBSITE : https://bidiknasional.com.Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya, Jl. Brigjen Katamsno No. 45 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Wartawan Bidik Nasional Dilengkapi Kartu Tanda Pengenal, Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi, Dilindungi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik PENGADUAN HOT LINE : 08123209649, 087748103562, 031-99728729. Email: bidiknasional@yahoo.com/ bidiknasional1@gmail.com/bidiknasional2@gmail.com

SEGALA PUBLIKASI YANG DITERBITKAN DI MEDIA INI MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB REDAKSI

KPH Bojonegoro Bersama Kejari Lakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Hutan



Kegiatan "Jaksa Masuk Hutan" di Pos PTM 09 RPH Ngorogunung, BKPH Clebung, KPH Bojonegoro, Selasa (29/4/2025). (Pri)

BOJONEGORO, BN - PERHUTANI Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro menggelar kegiatan penyuluhan hukum bertajuk "Jaksa Masuk Hutan" di Pos PTM 09 RPH Ngorogunung, BKPH Clebung, KPH Bojonegoro, Selasa (29/4/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat desa hutan, khususnya kepada anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Perum Perhutani KPH Bojonegoro, termasuk administrator, wakil administrator, Asper/KBKPH, beserta jajaran. Dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro turut hadir Kasi Intelijen Reza Aditya, para jaksa fungsional yakni Arifin, Okta, dan Reni beserta jajaran. Selain itu, LMDH dari berbagai wilayah juga turut hadir, di antaranya LMDH Jati Jaya (Ngorogunung), Jati Barokah (Sumberbendo), Rimba Sakti (Clebung), Wana Lestari dan Wana Karya (Cancang), serta Jati Makmur (Jono).



Slamet Juwanto selaku Administratur KPH Bojonegoro, brsama Reza Aditya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, saat memberi penyuluhan hukum.

Usai kegiatan, Slamet Juwanto menyampaikan apresiasi terhadap program ini. "Kami sangat mendukung sekali program Jaksa Masuk Hutan dalam rangka membantu kami untuk meningkatkan pemuliharaan hutan kembali sesuai dengan fungsinya. Kami juga mendukung agar hutan bisa memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Reza Aditya menekankan pentingnya sinergi antara penegak hukum dan pengelola hutan. "Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada KPH Bojonegoro atas terselenggaranya program ini. Tujuan utama kami adalah mendukung program pemerintah, baik

dalam penguatan petani hutan maupun pelestarian hutan. Kami melihat banyak inovasi dari KPH maupun LMDH yang patut dicontoh secara nasional," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk edukasi, bukan penindakan. "Harapannya, dengan sosialisasi ini, para petani hutan dapat menghindari pelanggaran dan meningkatkan hasil produksi secara berkelanjutan," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman hukum masyarakat desa hutan semakin meningkat, sehingga dapat menciptakan pengelolaan hutan yang lestari dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. (pri)

Warga Ngusik'an Tertipu Keponakan Mantan Bupati Jombang Milyaran Rupiah

□ Dalih untuk Ponpes, Kasusnya Diusut Polres Jombang



Gus Mahmud Rohani (berpeci hitam). (Foto: ist)



Septian Yana Putra, SH, Kuasa Hukum warga Kecamatan Ngusik'an



Beberapa warga Kecamatan Ngusik'an menunggu di Polres Jombang.

JOMBANG, BN - Salah satu penyakit hati pada setiap manusia adalah suka menipu. Siapa saja jika memungkinkan akan ditipu. Lebih parah lagi, ada sementara orang jika berhasil menipu orang lain dirinya dianggap sukses. Akhirnya, tipu menipu dianggap sebagai perbuatan biasa sehari-hari yang tidak beresiko menambah dosa dan juga tidak merugikan orang lain maupun dirinya sendiri.

Tidak adanya kesadaran bahwa menipu itu buruk dan harus di hindari, maka siapa saja jika memungkinkan akan di tipu. Seperti pengalaman yang terjadi di wilayah Kecamatan Ngusik'an, Kabupaten Jombang.

Kurang lebih ada tujuh belas korban penipuan dan penggelapan ramai ramai datang ke Polres Jombang untuk menanyakan tindak lanjut dari laporan mereka beberapa bulan yang lalu pada Polres Jombang. Mereka di dampingi oleh kuasa hukum Septiant Yana Putra, S.H dan Iwan Dwi Setianto, S.H, Jum'at (9/5).

Awal Kronologi kejadian, waktu itu para korban di bujuk rayu oleh Suliadi beserta Gus Mahfud Rohani yang diduga keponakan dari mantan bupati jombang dengan modus untuk usaha proyek pembangunan jalan dan irigasi.

Para korban diyakinkan oleh Suliadi tentang latar belakang Gus Mahfud Rohani yang sebagai Kiai pemilik pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jombang dan diduga putra seorang Kyai di Kabupaten Ngawi.

Setelah mendapatkan keyakinan tersebut, para korban percaya dan menyerahkan sertifikat dan BPKB, sebagai jaminan pinjaman di Bank BRI unit Keboan, Bank BPR Jatim cabang Kudu, Koperasi Rizqona Tambakberas dan Rentenir, ada juga yang uang tunai.

Alasan kronologi kejadian, waktu itu para korban di bujuk rayu mereka karena angsuran dari pinjaman tersebut di angsur oleh Gus Mahfud Rohani, serta keuntungan yang didapat akan di pergunakan untuk kebutuhan pondok pesantren milik Gus Mahfud Rohani yang ada di Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang. Para korban juga di yakinkan kalau usahanya berhasil, para korban bisa pinjam uang ke Gus Mahfud ratusan juta tanpa ada bunga.

Setelah berhasil meyakinkan para korban untuk meminjamkan surat surat berharganya, kemudian Suliadi dan Gus Mahfud Rohani mengajak para korban untuk datang ke Bank BRI unit Keboan, Bank BPR Jatim cabang Kudu, Koperasi Rizqona Tambakberas untuk tanda tangan dokumen dan penerimaan uang. Penerimaan uang waktu itu tidak dengan cara cash melainkan masuk ke rekening atas nama para korban.

Setelah uang pinjaman masuk ke rekening para korban, buku rekening dan ATM di minta oleh Suliadi dan di serahkan ke Gus Mahfud Rohani dan di saksi langsung oleh para korban.

Beberapa bulan berikutnya, para korban didatangi oleh Iksan mantri BRI unit Keboan yang bertujuan untuk menagih pembayaran pinjaman atas nama masing-masing korban. Serta di datangi oleh Sugiono yang mengaku dari Bank BPR Jatim cabang Kudu serta koperasi Rizqona. Mereka baru sadar kalau pinjaman atas nama mereka tidak pernah di bayar oleh Gus Mahfud Rohani alias kredit macet.

Sekira bulan mei 2024 para korban di dampingi Kepala Desa Manunggal Kecamatan Ngusik'an mendatangi rumah Gus Mahfud, namun tidak ketemu, mereka hanya di temui oleh orang tua Gus Mahfud di Ngawi.

Waktu itu orang tua Gus Mahfud berkata sanggup untuk melunasi hutang anaknya dengan cara menjual pondok pesantren milik anaknya, namun sampai sekarang nasib kurang lebih 17 orang tersebut masih belum terbayar.

Sementara itu Rendra selaku Kanit Pidum Polres Jombang menjelaskan, "untuk kedatangan para pelapor korban penipuan yang menanyakan sampai sejauh mana perkembangannya, semua ini masih dalam proses lidik, kami mohon waktu" ujarnya. Sementara itu Sepviant Yana Putra, S.H. selaku kuasa hukum para korban juga memberikan apresiasi pada pak Rendra selaku Kanit Pidum Polres Jombang, karena bisa menerima beberapa orang untuk menanyakan perkembangannya laporannya.

"Kanit menanggapi dengan baik, saya berharap supaya ke depannya tetap seperti ini tetap membela rakyat lemah, yang tidak mengerti aturan hukum yang berlaku" ujar Vian.

"Orang-orang ini di tipu oleh orang kuat, ditipu oleh seorang Gus, tokoh ponpes Tambakberas Jombang yang juga mantan seorang anggota dewan dan Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Ngawi. Jadi orang-orang ini menanyakan hal tersebut dan di terima dengan baik oleh pak Rendra selaku Kanit Pidum. Saya sangat memberikan apresiasi yang lebih untuk Polres Jombang, semoga perkara ini cepat selesai dan integritas dalam menjalankan profesinya," pungkasnya.

Sementara untuk kerugian dari para korban akibat ulah Suliadi dan Gus Mahfud Rohani total mencapai Rp 2.500.000.000,- (dua setengah miliar rupiah). Atas dasar penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Suliadi serta Gus Mahfud Rohani bisa di jerat pasal berlapis. Pasal 372 KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 374 KUHP, kemungkinan di kembangkan dengan pasal 2,3,4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Selanjutnya kepada masyarakat agar berhati-hati, jangan mudah percaya dengan adanya bantuan atau modus berkedok pondok pesantren, yang ternyata menipu hanya bertujuan untuk kepentingan perut

Sementara Suliadi dan Gus Mahfud Rohani belum berhasil dihubungi BN, klarifikasi dan hak jawab keduanya ditunggu redaksi BN di nomor HP 08123209649. (Tok)

Siswa MAN 4 PP Jombang Mambaul Ma' Arif Siap ke Jenjang Lebih Tinggi Menuju Dunia Kerja



Kepala Madrasah, Moh. Ilyas saat memimpin rapat penting untuk menetapkan kelulusan siswa kelas XII tahun pelajaran 2024-2025, Senin (05/05).

JOMBANG, BN - Menggelar rapat kelulusan siswa perlu persiapan yang matang dan memastikan semua peserta rapat hadir guna membahas kriteria kelulusan, mengevaluasi nilai dan mengumumkan keputusan kelulusan. Selain itu juga penting untuk mengingatkan siswa dan wali kelas agar

menghindari perilaku negatif saat pengumuman. Maka untuk itu, MAN 4 Jombang menggelar rapat penting untuk menetapkan kelulusan siswa kelas XII tahun pelajaran 2024-2025, Senin (05/05).

Pada acara yang berlangsung di Gedung K.H. Bishri Syansuri Lt. 3. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha, Wali Kelas, Guru BK, serta Guru Mata Pelajaran Kelas XII.

Sementara saat rapat tersebut berlangsung tertib dan secara bergiliran wali kelas melaporkan perkembangan siswa mulai dari kehadiran, evaluasi pembelajaran, hingga permasalahan yang terjadi selama proses pendidikan.

Selain itu rapat dilanjutkan dengan guru BK dan guru mata pelajaran yang menyampaikan laporan pendampingan terhadap siswa.

Bahkan selama proses tersebut, Didik Pratikno selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum juga menegaskan kriteria kelulusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia serta internal madrasah.

"Adapun kriteria kelulusan peserta didik MAN 4 Jombang tahun pelajaran 2024-2025 meliputi, keikutsertaan seluruh program pembelajaran dan ujian akhir madrasah, sikap, nilai akademik, rapat bersama bapak ibu guru, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam kegiatan madrasah," paparnya.

Setelah itu melihat melihat dari hasil rapat tersebut, sebanyak 509 siswa dari berbagai program keahlian secara resmi dinyatakan lulus 100%. Surat Keputusan Kelulusan nomor 084 tahun 2025 dibacakan secara langsung oleh Kepala Madrasah, Moh. Ilyas.

Selanjutnya, berdasarkan hasil rapat dewan pendidik dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penilaian, "Maka dengan ini saya menyatakan, seluruh peserta didik kelas XII tahun pelajaran 2024-2025 yang berjumlah 509 siswa dinyatakan lulus 100%," ujarnya.

Dari kelulusan 509 peserta didik ini menjadi bukti nyata dari konsistensi MAN 4 Jombang dalam menjalankan misi pendidikan yang holistik. Diharapkan para lulusan dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau terjun ke masyarakat dengan membawa nilai-nilai keilmuan dan akhlakul karimah yang telah ditanamkan selama di madrasah dan pesantren.

Setelah rangkaian pembahasan selesai, rapat ini menjadi penanda proses pendidikan kelas XII tahun pelajaran 2024-2025 telah tuntas, dan para siswa siap melangkah ke jenjang pendidikan lebih tinggi bahkan menuju dunia kerja. (Tok/adv)

Proyek Jalan Hotmix Desa Ngrandu Lor Peterongan Diduga Rugikan Negara

JOMBANG, BN - Pembangunan jalan hotmix memang rawan di korupsi, karena berbagai faktor, termasuk kemungkinan penyalahgunaan keuangan, dan gratifikasi. Modus yang sering digunakan antara lain rekayasa dokumen dan tagihan, penggunaan material yang tidak sesuai standar, dan penyelewengan anggaran. Seperti pada pembangunan jalan hotmix di Desa Ngrandu lor Kecamatan Peterongan patut dipertanyakan pengerjaannya?

Menurut sumber Bidik Nasional (BN), salah satunya adalah besarnya nilai anggaran yang dibutuhkan. Lebih diketahui, untuk pembangunan jalan hotmix yang di buat untuk pengaspalan jalan desa sangat terjangkau harganya. Sedangkan untuk aspal hotmix AC WC permeter kuadrat (m²) bervariasi tergantung kualitas, ketebalan dan lokasi pengerjaannya.

Sedangkan secara umum harga aspal hotmix AC WC / m² berkisar antara Rp 30 ribu hingga Rp 35 ribu rupiah. Desa Ngrandu lor sendiri baru saja memperbaiki jalan yang rusak dengan menggunakan aspal hotmix AC WC. Dimana pengerjaannya diduga me mark up anggaran.

Jadi perlu diketahui, proyek jalan hotmix yang menggunakan anggaran negara sering kali menjadi target korupsi. Seperti proyek jalan hotmix di Desa Ngrandu lor, Kecamatan Peterongan, diduga ada penyalahgunaan anggaran. Diduga terjadi penggelembungan harga bahan baku, juga pemalsuan laporan keuangan atau bahkan atau pengalihan anggaran ke kantong pribadi pada pejabat desa setempat.

Sementara diketahui, pembangunan jalan hotmix di Desa Ngrandu lor, Kecamatan Peterongan diambilkan dari dana desa tahun 2025 dengan nilai anggaran Rp 158.371.000,- dan di bangunkan dengan volume 300 x 3,5 m.

Untuk memastikan dugaan adanya mark up pekerjaan tersebut, tim media mencoba menemui Rofidul Kepala Desa Ngrandu lor untuk konfirmasi pembangunan jalan hotmix tersebut. Namun kepala desa tidak ada di kantor. Saat di hubungi melalui ponselnya tidak bisa. Hingga berita ini di turunkan, kepala desa belum ada jawaban. Kepala Desa Ngrandu lor biasanya mudah di temui, namun akhir-akhir ini memang sulit di temui.

Saat BN mengecek kondisi proyek jalan hotmix yang selesai di kerjakan tersebut, ada dugaan kuat ada korupsi melalui pengadaan material. Terlihat pekerjaan kurang baik dan dari material yang diragukan kualitas dan speknya. (Tok)



Jalan Hotmix Desa Ngrandu Lor Peterongan tampak berlubang.

KEHILANGAN STNK

Telah hilang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. Polisi M- 2415 - WF Merk Honda Type NF 100 TD, Jenis Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2008, Isi Silinder 100 CC, Warna Merah, No. Rangka MH1HB6111BK360198, No. Mesin H861E-1353274, atas nama ISHAK, alamat Jl. SAMRATULANGI 13 RT/RW 002/006 KALIANGET SUMENEP. Bagi yang menemukan mohon dikirim ke alamat yang tertera pada STNK dan akan diberi imbalan.

Pelaksanaan Sismiop di Desa Dadaplangu Ponggok Berjalan Sukses

BLITAR, BN - Hari ini Rabu (30/4) pemerintah kabupaten melalui desa Dadaplangu kecamatan Ponggok mengadakan sosialisasi pelaksanaan Sismiop (Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak) di Balai desa Dadaplangu. Hadir dalam acara tersebut kepala desa Dadaplangu Rokimun, kepala bidang P2PDRD Ahmad Winarno, Kabid P2SPD Dedi Sukmono, staf Dipenda, tokoh masyarakat, ketua RW dan Ketua RT.



Peserta Sismiop sedang diskusi dengan pemateri. (sastro)

Usai Kepala desa dan kepala bidang Ahmad Winarno menyampaikan paparan, kepala seksi menyampaikan untuk pelaksanaan Sismiop termasuk berisi data data pemilik tanah. Untuk saat ini jika pemilik tanah sudah punya sertifikat tetapi masih ada kekeliruan saat ini bisa diganti dengan melampirkan data-data baru. Adapun Ruang lingkup pekerjaan Sismiop terdiri atas Pengawasan pengumpulan data fisik, Pengawasan pelaksanaan pemberian NOP, Pengawasan pengumpulan data harga jual.

Selain itu dengan melalui Sismiop maka warga akan mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan pembayaran PBB. Melalui Sismiop pula warga yang semula kesulitan dalam mengurus tanah pekarangannya sekarang akan dipermudah. Manfaat Sismiop itu sendiri adalah

mengingat besarnya jumlah objek pajak dan beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, maka belum seluruhnya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan objek pajak yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkannya, meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak PBB-P2, data seluruh objek dan subyek PBB yang telah diberi NOP, kode ZNT dan DBKB dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu yang disimpan dalam media computer dan pengenalan pajak yang lebih adil dan merata.

Selain soal letak tanah yang di dalam tetapi tertulis di pinggir maka akan dibenahi dengan ditulis masuk ke dalam. Sehingga pajaknya akan berkurang dibandingkan dengan yang di dalam.

Untuk itu dalam Sismiop yang segera dimulai makan warga diminta bersiap - siap untuk mengajukan diri dan bila ada kesalahan kesalahan segera di benahi. Untuk itu paling dalam sehari petugas bisa mencatat maksimal 20 bidang. Memang dalam ini untuk tahun 2025 ada kenaikan meskipun tidak terlalu tinggi. Maka diharapkan warga sadar dan membayar pajak bumi dan bangunan.

(Sastro)

Bupati Kholilurrahman Lepas 1.032 CJH Pamekasan Tahun 2025



Bupati Pamekasan Drs Kholilurrahman SH, Msi saat melepas calon jamaah haji di Masjid Asy Syuhada' kabupaten Pamekasan, Sabtu 3/5/2025. (Kholis)

PAMEKASAN, BN - Sebanyak 1.032 Calon Jamaah Haji (CJH) tahun 2025 di lepas secara simbolis oleh Bupati Pamekasan Drs Kholilurrahman SH, Msi yang berlangsung di Masjid Asy Syuhada' kabupaten Pamekasan, Sabtu 3/5/2025.

Pelepasan Calon Jamaah Haji (CJH) asal Pamekasan tersebut dihadiri langsung oleh Kemenag Pamekasan Mawardi S.Ag dan Kapolres pamekasan AKBP Hendra

Kholilurrahman SH, Msi berharap kepada seluruh Calon Jamaah Haji (CJH) yang merupakan sebagai tamu Allah itu, dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan menjaga kesehatan, baik fisik maupun psikis selama menjalankan ibadah haji di tanah suci Mekkah hingga kembali lagi ke daerah gerbang salam Pamekasan. "Saya harap bapak/ibu sekalian menjadi haji yang mabrur dan predikat guyyuburrahman

serta di mudahkan oleh Allah S.W.T, amien ya rabbal alamin," harapnya.

Kholil juga menyampaikan para calon jamaah haji sebagai tamu Allah tersebut harus betul-betul memanfaatkan kesempatan ini dengan baik selama berada di tanah suci Mekkah, yakni dengan cara meningkatkan ibadah kepada Allah S.W.T. Sebab, tidak semua memiliki kesempatan menunaikan ibadah haji meskipun memiliki biaya lebih. Bahkan mereka juga yang telah mendaftar menjadi Calon Jamaah Haji (CJH), oleh karena itu daftar tunggu haji hingga berselang 30 tahun tersebut harus menjadi salah satu penyemangat bagi tamu Allah untuk meningkatkan ibadah kepada-NYA. "Luruskan hati niat ibadah semata-mata karena Allah, sebab di Mekkah barokahnya besar, maka ujiannya pasti besar pula," ungkapnya.

Selain itu, kholil juga meminta kepada semua

para tamu Allah Calon Jamaah Haji (CJH) untuk ikut mendoakan kabupaten Pamekasan selama berada di tanah suci, supaya rahmat dan barokahnya senantiasa mengalir hingga terwujud kabupaten pamekasan sebagai baladun thoyyibatun wa robbun ghafur. "Saya atas nama pemerintah kabupaten Pamekasan secara resmi melepas CJH asal pamekasan tahun 2025," pungkasnya.

Perlu diketahui pembedakan 1.032 CJH asal kabupaten pamekasan terbagi 5 kelompok terbang (kloter) yaitu kloter 27, 28, 29, 49 dan kloter 95 sedangkan lima kloter itu di berangkatkan secara bertahap. Pertama, kloter 27, 28 dan 29 yang akan di berangkatkan pada hari kamis tanggal 9 Mei 2025. kedua, kloter 49 di berangkatkan hari rabu tanggal 15 Mei 2025. Ketiga, kloter 95 akan di berangkatkan pada hari Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025.

(Kholis)

Proyek Jalan Paving Desa Rejoagung Ploso Diduga Markup Harga Paving

JOMBANG, BN - Modus korupsi dalam proyek pemasangan paving block sering melibatkan mark-up harga diatas harga wajar. Bahkan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tidak sesuai standar. Selain itu korupsi pada proyek paving diduga sudah diatur pada tahap perencanaan anggaran. Persiapan anggaran, persiapan pengadaan, pelaksanaan, serah terima pekerjaan, dan pengawasan.



Proyek Jalan Paving Desa Rejoagung Ploso.

Adanya dugaan mark-up anggaran Dana Desa tahun 2025 dalam proyek pembangunan jalan paving di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang mencuat ke publik. Isu ini menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan warga desa setempat.

Bahwa Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Patut di sayangkan adanya dugaan bahwa anggaran tersebut dimanfaatkan secara tidak semestinya untuk kepentingan perut kelompok yang mementingkan sendiri tanpa memedulikan kepentingan masyarakat.

Bahwa saat ini proyek menjadi sorotan adalah pembangunan jalan paving yang berada di Dusun Kopensari RW 02 dengan anggaran sebesar Rp 81.500.000,-. Warga menduga anggaran tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan volume yang di bangunan.

Sementara itu salah seorang warga setempat yang tidak mau di sebutkan namanya, mengatakan, "Anggaran Rp 81.500.000,- dibangunkan dengan volume 495 meter apa tidak salah itu?" ujar warga setempat.

Selain itu ada salah informasi dari salah seorang pemborong di Jombang mengatakan, "Paving untuk k 200 borongan per meter nya Rp 70 ribu, kalau k 300 borongannya

Rp 80 ribu sampai Rp 90 ribu. Kalau proyek pembangunan paving jalan desa biaya per meternya di atas seratus ribu itu bisa di katakan mark up anggaran," ungkapnya sambil geleng-geleng kepala ketika di minta pendapat oleh Bidik Nasional (BN).

"Kalau k 300 per meternya menelan biaya Rp 90 ribu berarti di kalikan volume 495 meter, itu hanya mengha-

biskan anggaran Rp 44.550.000,-

Jadi disini bisa di katakan ada dugaan mark up anggaran. Jangkaan Rp 81 juta, Rp 60 juta pun saya berani borong," ujar pemborong tersebut.

Sementara untuk menggali informasi lebih lanjut, kemudian tim media menjumpai Sugeng selaku Kepala Desa Rejoagung untuk konfirmasi. Namun kades menyuruh ke TPK saja. Saat itu Hartono selaku TPK mengatakan, "Itu sudah sesuai RAB mas," ujarnya, (Selasa, 29/4)

Ketika di tanya terkait RAB, Hartono mengatakan RAB buat sendiri dan sudah di verifikasi oleh pendamping desa. Pertanyaan, kemanakah sisa anggaran tersebut? Perlu diketahui, harga paving K 300 Rp 55 ribu per meter, apakah mungkin biaya material dan ongkos pekerja per meternya mencapai seratus ribu rupiah lebih.

Perlu diketahui, pada proses pengadaan ada indikasi tidak transparan, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan.

Ini menunjukkan pengawasan yang lemah. Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap proyek tersebut, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. (Tok)

Lancar, Upacara Petik Padi di Sentul Kepanjen Kidul Kota Blitar



Kegiatan upacara Petik Padi di Sentul Kepanjen Kidul Kota Blitar. (sastro)

BLITAR, BN - Hari ini Minggu (11/5) warga Perani Sido Mulyo 5 Suluh Sembot RW 06 kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar mengadakan acara Petik Padi di daerah yang terletak di dusun Sembot. Hadir dalam acara tersebut kepala kelurahan Sentul Sudarwanto, Ketua RT 01 Huda, Ketua RT 03 Sugeng, Ketua

RT 03 Herman Felani, Ketua RW 06 Supriyanto, Bhabinsa, Babinkamtibmas serta tokoh masyarakat dan para petani di dukuh Sembot.

Upacara yang dimulai dengan penataan jadi peserta perabotan, nahan pasar, sejumlah sebagai wujud syukur kepala Allah SWT yang kesemuanya di doakan oleh salah satu sesepuh yakni Mbah Sumari.

Dalam sesorahnya sesepuh Sumari menyatakan bahwa barang yang di bawa oleh petani semuanya merupakan wujud syukur para petani atas melimpahnya hasil pertanian yang sudah mereka dapatkan. Para petani merasa hasil yang mereka dapatkan sudah melampaui yang diperkirakan sebelumnya. Dengan demikian terdapat sisa hasil yang bisa didapatkan petani untuk kehidupan sehari-hari.

Sementara Kepala Kelurahan Sentul Sudarwanto menyatakan bahwa "pada saat ini hasil panen kelompok tani Sidomulyo 5 RT. 01,02,03 RW 06 Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, sudah lebih bagus daripada panen - panen sebelumnya. Oleh karena itu para petani mengucapkan syukur kepada Allah SWT, yakni dengan acara PETIK PADI di Kelurahan Sentul. Para petani juga merasa bersyukur bahwa panen kali ini tidak ada hama. Disisi lain para istri petani juga sangat membantu para suaminya mengolah hasil pertanian sehingga hasilnya bisa dirasakan bersama.

(Sastro)

Pemkab Pamekasan Kembali Raih Penghargaan Opini WTP Dari BPK-RI Tahun 2025



Kepala BPK provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin saat menyerahkan langsung penghargaan opini WTP kepada bupati Pamekasan Drs Kholilurrahman, SH, M.Si. (ist)

PAMEKASAN, BN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Senin 21/04/2025

Capaian penghargaan opini WTP pemerintah kabupaten Pamekasan itu, merupakan yang ke 11 kalinya secara berturut-turut, terhitung sejak tahun 2014-2025, namun demikian sebelumnya pada tahun 2011 pemkab Pamekasan juga pernah meraih penghargaan opini yang sama, hanya saja, pada tahun 2012-2013 meraih penghargaan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penyerahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) pemerintah kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2024 dan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2025 yang diserahkan oleh kepala BPK provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin tersebut diterima langsung oleh bupati Pamekasan Drs Kholilurrahman, SH, M.Si yang didampingi oleh ketua DPRD kabupaten Pamekasan Ali Masykur dan sekretaris daerah (Sekda) Masrukin, S.sos, Msi di Surabaya.

Menurut bupati Pamekasan Drs Kholilurrahman, SH, M.Si usai menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap jajaran OPD dan stakeholder di kabupaten Pamekasan atas capaian penghargaan yang telah di raih kali ini, maka dari itu pihaknya berharap untuk tahun berikutnya predikat penghargaan itu bisa di pertahankan. "Saya ucapkan terima kasih kepada segenap jajaran OPD dan stakeholder di kabupaten Pamekasan yang telah ikut berperan serta dalam meraih penghargaan opini WTP dari BPK-RI tahun 2025 ini," pungkasnya. (Kholis)

Pencurian Kabel Telkom Marak di Sidoarjo, Aparat Diminta Tindak Tegas



Pengambilan/pencurian kabel Telkom di sepanjang pinggir Jalan Raya Kemas, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Minggu Dinihari (27/04/2025). (rosi)

SIDOARJO, BN - Penarikan dan pengambilan kabel primer tembaga milik aset PT. Telkom Indonesia, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mulai marak akhir-akhir ini. Padahal masalah perizinan sampai saat ini masih simpang siur, PT Telkom tidak pernah merilis secara resmi siapa sebenarnya yang diberi kewenangan atau sebagai pemenang tender dalam proyek ini. Tapi kenyataannya di lapangan masing-masing pihak mengklaim bahwa Perusahaan merekalah yang mempunyai ijin untuk mengambil kabel Telkom ini.

Seperti diketahui oleh Tim awak media ini, pada Minggu Dinihari (27/04/2025), disepanjang pinggir Jalan Raya Kemas, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, terlihat beberapa para pekerja tanpa mengenakan perlengkapan

keselamatan kerja (K3) melakukan penarikan kabel primer tembaga di dalam tanah menggunakan sarana sebuah Dump Truck Colt Diesel.

Kepada bidiknasional.com (bn.com), bahwa kegiatan penarikan kabel primer tembaga di dalam tanah, mengaku dari Tim resmi dibawah naungan PT. Putri Ratu Mandiri (PRM), yang berkantor pusat di Jakarta Timur. "Pengerjaan itu, resmi," ucap pria berinisial S yang mengaku sebagai mitra kerja dari PRM.

"Monggo sampean bisa komunikasi sama APH (Aparat Penegak Hukum) setempat agar bisa memastikan kalo kegiatan tersebut Vandalis apa bukan," imbuhnya.

Sementara itu, aparat setempat belum bisa dihubungi oleh wartawan koran ini, untuk dimintai penjelasannya terkait perizinan penarikan kabel primer tembaga di dalam tanah, yang diakui resmi pengerjaannya.

Diketahui sebelumnya, bahwa PT. Putri Ratu Mandiri, telah melakukan hal yang sama di Surabaya, tepatnya di Jalan Kasuari, pada Minggu Malam (02/02/2025), dan mengaku dari Tim resmi. Namun, tidak ada kelanjutannya.

Hingga berita ini dipublikasikan ke media massa, wartawan koran ini masih koordinasi dengan APH setempat, apakah pengerjaan tersebut telah secara resmi dikerjakan oleh PT. Putri Ratu Mandiri. Sebab beberapa kejadian serupa di seluruh Indonesia berhasil ditindak APH dalam hal ini Kepolisian dan kasusnya ada yang sudah diputus penjara dan ada yang masih berproses. Pasal yang dikenakan pencurian aset negara dan melakukan pengrusakan fasilitas umum. (rosi)

Swakelola Hanya Formalitas, Pekerjaan Rabat Beton Desa Semut Diduga Dikerjakan Pihak Ketiga



Pekerjaan rabat beton di Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang disorot. (diikin)

PEKALONGAN, BN – Proyek pembangunan jalan rabat beton di Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, disorot masyarakat karena diduga tidak dilaksanakan secara swakelola sebagaimana mestinya. Padahal, proyek

yang bersumber dari Dana Desa ini seharusnya mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Seorang pekerja yang

enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pekerjaan proyek tersebut telah berlangsung sekitar enam hari, dan dikelola oleh seseorang bernama Edy, warga Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa.

“Saya ikut kerja sudah sekitar enam harian, bosnya Pak Edy dari Kemplong Wiradesa,” ungkapnya saat ditemui pada Kamis (22/4/2025).

Ia juga menyebut bahwa mayoritas pekerja yang terlibat berasal dari luar desa. “Orang sini yang ikut kerja sekitar tiga orang, yang lainnya dibawa Pak Edy dari Kemplong,” lanjutnya.

Dari informasi yang tertera di papan proyek, kegiatan ini berupa pembangunan jalan rabat beton yang berlokasi di Dukuh Babadan, dengan volume 140 meter x 4 meter x 0,2 meter (112 m³), menggunakan anggaran sebesar Rp176.905.000 dari Dana Desa tahun 2025.

Kepala Desa Semut, Sugiyono, saat dikonfirmasi

melalui WhatsApp, membenarkan bahwa proyek sudah berjalan sekitar enam hari. Namun, ketika ditanyakan soal keterlibatan Edy sebagai kontraktor, ia menyatakan bahwa Edy hanya bertugas sebagai tenaga teknis.

Sementara itu, Edy sendiri saat dihubungi melalui sambungan telepon membantah sebagai pihak pelaksana penuh proyek. “Saya hanya menatakan proyeknya saja, selebihnya bisa tanya ke Pak Sekdes atau langsung ke Pak Kades,” ujarnya singkat.

Pengalihan proyek kepada pihak luar semacam ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat regulasi pengelolaan Dana Desa secara tegas mengatur bahwa pelaksanaan proyek harus mengedepankan pola swakelola, dengan tujuan utama memberdayakan warga desa, menciptakan lapangan kerja lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Diikin)

Selain Divonis Korupsi, Mantan Kades Coprayan Juga Warisi Utang Proyek Ratusan Juta



Rozak, Plt. Kades Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan (Foto: ist)

PEKALONGAN, BN - Polemik kasus korupsi dana desa yang menyeret mantan Kepala Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Mutofar, terus bergulir. Majelis hakim memvonis Mutofar dengan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan atas penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2021. Ia juga diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 238 juta.

Namun, vonis tersebut ternyata bukan penutup dari masalah yang ditinggalkan sang mantan kades. Dari keterangan sejumlah warga, Mutofar diduga masih meninggalkan utang kepada pihak ketiga atas proyek pengaspalan jalan desa senilai ratusan juta rupiah yang hingga kini belum dilunasi. Dampaknya, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut kini menagih pembayaran kepada pemerintah desa, memicu tarik ulur yang berujung pada keterlibatan kembali pihak ketiga dalam proyek infrastruktur desa tahun 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Coprayan, Rozak, membenarkan bahwa proyek saluran desa telah selesai dikerjakan tahun ini di dua titik, masing-masing dengan nilai anggaran Rp 90 juta dan Rp130 juta. Ia menekankan bahwa proyek dijalankan dengan sistem swakelola yang melibatkan masyarakat desa. “Memang ada keterlibatan pihak ketiga, tapi mereka hanya bertindak sebagai mandor proyek,” ujar Rozak saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/4/2025).

Rozak juga mengakui bahwa Mutofar meninggalkan utang proyek kepada Azam Sholihin, warga Kajen yang memiliki rumah di Batang. Namun, jumlah pasti utang yang belum dilunasi hingga kini belum dapat dipastikan. “Kami sudah menggelar rapat bersama perangkat desa, Tim Pelaksana Anggaran (TPA), dan pendamping desa. Kami ingin semua berjalan transparan agar tidak timbul masalah baru ke depan,” tambahnya.

Rozak menambahkan, untuk proyek saluran tahun ini, pembelian material dilakukan di sekitar wilayah desa. Namun, sebagian tenaga kerja didatangkan dari luar karena pertimbangan efisiensi anggaran dan perbedaan harga upah.

Sementara itu, Azam Sholihin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan bahwa dirinya pernah menjadi mandor dalam proyek pengaspalan atas permintaan langsung dari Mutofar. “Waktu itu pak kades minta tolong karena warga mendesak dan sempat melakukan aksi demo. Saya bantu kerjakan dulu dengan janji akan dibayar dari anggaran tahun berikutnya. Tapi ternyata beliau kena kasus, jadi ya, gak dibayar,” ujar Azam. (diikin)

Pemdes Binangun Gelar Konsultasi Publik Raperdes Pengangkatan dan Pemberhentian Staf

□ Pj Kades Dede Harisman: Kami Masih Butuh Masukan dari Semua Pihak

BANJAR, BN – Pemerintah Desa Binangun melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Perangkat Desa, bertempat di Aula Pangagung Mulya Desa Binangun, kecamatan Pataruman pada Kamis 02 Mei 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan kelembagaan desa, antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Staf perangkat desa, BPD terpilih, Forum RT/RW, Tribina, Karang Taruna, LPM, ketua Posyandu, serta unsur Linmas dan MUI se-Desa Binangun.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Binangun, Dede Harisman.SIP. dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pihaknya masih memerlukan banyak masukan demi penyempurnaan draf peraturan tersebut.

“Kami masih merasa bingung terhadap beberapa pasal dalam rancangan ini, sehingga diperlukan pendapat dari



Konsultasi Publik Raperdes Pengangkatan dan Pemberhentian Staf yang digelar Pemdes Binangun. (asep)

berbagai elemen agar peraturan ini benar-benar matang dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar kepala desa.

Diskusi berjalan aktif, dengan sejumlah peserta menyampaikan pendapat dan usulan perbaikan terhadap isi Raperdes, khususnya terkait mekanisme pengangkatan, evaluasi, dan pemberhentian staf perangkat desa.

Konsultasi publik ini merupakan bagian dari proses legislasi tingkat desa yang bersifat partisipatif. Seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan penyempurnaan Raperdes sebelum diajukan dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk disahkan menjadi Peraturan Desa (Perdes).

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian staf desa dapat berjalan lebih transparan, objektif, dan akuntabel demi mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

(Asep Sujana)

Penyaluran BLT DD Triwulan I Tahun 2025 di Desa Jatimulya Berjalan Lancar

SUBANG, BN – Pemerintah Desa Jatimulya telah melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk Triwulan I Tahun 2025 pada hari Selasa, 22 April 2025. Bertempat di Bale Sawala Masyarakat (Aula Desa Jatimulya), Kec. Compreng kab, Subang Jawa Barat. kegiatan ini dimulai pada pukul 13.15 WIB dan berlangsung lancar serta tertib.

Sebanyak 36 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan BLT DD untuk periode bulan Januari, Februari, dan Maret 2025. Sementara itu, terdapat 2 orang KPM yang berhalangan hadir karena menderita stroke dan mengalami kelumpuhan total, yaitu atas nama H. Car dan



kepala desa jatimulya (Din Wahidin) saat memberikan uang BLT DD tahun 1 (satu) kepada warga penderita stroke.

Bapak Sar. Penyaluran kepada keduanya dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa Jatimulya, Bapak Din Wahidin, dengan mengantarkan bantuan tersebut ke rumah masing-masing penerima.

Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Total bantuan yang

diterima untuk Triwulan I ini berjumlah Rp 900.000,- per KPM.

Penyaluran BLT DD akan dilanjutkan kembali pada pekan pertama bulan Mei 2025 untuk periode bulan April dan Mei 2025, serta pekan keempat bulan Mei 2025 untuk periode bulan Juni dan Juli 2025. Dengan demikian, tahap I penyalu-

ran BLT DD Tahun 2025 mencakup total 7 bulan, yaitu mulai dari Januari hingga Juli 2025.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari unsur Kecamatan Compreng, Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Compreng, dan Pendamping Desa Jatimulya. Kehadiran mereka turut memastikan bahwa penyaluran bantuan berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran.

Pemerintah Desa Jatimulya berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Ujar kepala desa Din Wahidin.

(M.Tohir/Kardiawan)

Tahan Tersangka Penganiayaan, Kejari Semarang Dapat Apresiasi



Dr. Hj. Numalah, SH, M.H., Kuasa Hukum LRSN. (peni)

SEMARANG, BN - Dr. Hj. Numalah, SH, M.H., Kuasa Hukum LRSN Apresiasi Kejari Semarang yang Lakukan Penahanan Tersangka Penganiayaan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang akhirnya menerima limpahan Tersangka LU maupun barang bukti, terkait kasus penganiayaan dari Penyidik Polrestabes Semarang, dengan korban berinisial LRSN (26).

Nurmalah menyampaikan, “Kami sangat mengapresiasi Kejaksaan Negeri Semarang yang telah melakukan Penahanan tersangka kasus penganiayaan terhadap LRSN, kasus ini sudah sangat lama tapi Alhamdulillah ini P21 tahap 2,” ujarnya.

Dikatakan laporan korban LRSN (26) ke Polrestabes Semarang, yang diduga dianiaya

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Ngopi Bareng Wartawan Subang Utara, Pererat Tali Silaturahmi dan Sinergi Antar Media



Kabiro BN Subang M Tohir saat ngopi bareng bersama wartawan Subang Utara. (ist)

SUBANG, BN – Dalam rangka memperkuat tali silaturahmi dan memperkuat sinergi antar wartawan, sejumlah jurnalis dari wilayah Subang Utara menggelar pertemuan santai bertajuk “Ngopi Bareng Wartawan Subang Utara” pada Selasa (30/4). Acara ini berlangsung di bawah flyover Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh wartawan dari berbagai media lokal dan nasional, antara lain Media Java, Media Sergap, dan Media Bidik Nasional.

Dengan suasana yang santai namun penuh makna, para jurnalis saling berbagi cerita, bertukar informasi, dan berdiskusi ringan mengenai dinamika kerja jurnalistik di lapangan.

“Ngopi bareng ini bukan sekadar kumpul-kumpul biasa. Ini adalah momen penting untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga kekompakan antar sesama insan pers, khususnya di wilayah Subang Utara,” ungkap Asep Supandi/oles wartawan bidik Nasional com.

Selain memperkuat hubungan personal, pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi ringan mengenai peran media dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Asep Supandi/oles berharap kegiatan semacam ini bisa menjadi agenda rutin, agar komunikasi antar wartawan tetap terjalin erat, serta dapat menjadi ruang saling mendukung di tengah tantangan dunia jurnalistik saat ini.

Acara yang berlangsung hangat dan penuh canda tawa ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga profesionalisme, solidaritas, serta integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik. (M.tohir/Asep Supandi/oles)

Musyawarah Desa Rutin, Wadah Silaturahmi dan Perencanaan Pembangunan



Kepala Desa Ciasem Tengah, Mista Rangun saat memimpin Musdes. (Tohir)

SUBANG, BN – Pemerintah Desa Ciasem Tengah kembali menggelar kegiatan rutin mingguan “Rapat Minggon” yang dilaksanakan setiap hari Rabu di Aula Kantor Desa. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antar perangkat desa mulai dari Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, staf, RT, hingga Kepala Dusun (Kadus), sekaligus sebagai forum pemaparan program kerja baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Kepala Desa Ciasem Tengah, Mista Rangun, dalam sambutannya menekankan pentingnya kekompakan dan kerja sama lintas unsur pemerintahan desa. Ia juga

selalu melakukan absensi peserta rapat untuk memastikan partisipasi aktif dari seluruh unsur yang terlibat. “Rapat minggon ini bukan sekadar formalitas, tapi sebagai wadah komunikasi, sinergi, dan evaluasi terhadap program yang telah dan akan dijalankan,” ungkap Mista Rangun.

Selain itu, dalam periode kepemimpinannya selama 5 tahun terakhir, Mista Rangun berhasil merealisasikan pembangunan infrastruktur desa, terutama jalan desa yang kini telah mencapai 80% dari total wilayah dengan prinsip pemerataan anggaran. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Desa Ciasem Tengah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan musyawarah desa juga membahas agenda revitalisasi BUMDes dan program ketahanan pangan, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. (Asep Supandi/oles)

BLK Kediri Gelar Pelatihan Service Sepeda Motor Sistem Injeksi



Peserta pelatihan Teknik Sepeda Motor (TSM) atau servis sepeda motor sistem injeksi bersama instruktur.

KEDIRI, BN - UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kediri yang berada di Jalan Pare Wates KM 1,5, Desa Gedangsewu Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melaksanakan pelatihan Teknik Sepeda Motor (TSM) atau servis sepeda motor sistem injeksi yang diikuti 16 peserta berasal dari Kediri dan luar

hadapi dunia kerja.

Nur Basthomi Arifin, ST, selaku Instruktur Otomotif TSM menyampaikan materi yang diberikan untuk pelatihan servis sepeda motor sistem injeksi. Mulai servis rem, kopling, mesin, kemudi sampai diagnosa sistem injeksi.

Kediri sampai 280 jam pelatihan atau 30 hari masuk, Kamis (8/5/2025) pukul 09.00 WIB.

Pelatihan TSM ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta dalam bidang perbaikan dan perawatan sepeda motor sistem injeksi, sehingga siap meng-

“Selain itu, peserta juga diberikan latihan praktik langsung, termasuk perbaikan mesin, kelistrikan, dan sistem transmisi yang banyak diaplikasikan pada sepeda motor modern,” ucap Basthomi.

Lanjut Basthomi, untuk pelatihan yang diikuti 16 peserta kita jalankan sampai 280 jam pelatihan atau 30 hari masuk. Peserta yang ikut pelatihan di BLK Kediri dan nanti jika dinyatakan lulus akan mendapatkan dua sertifikat, baik dari BLK Kediri dan BNSP.

“Di luar pelatihan nanti akan dijadwalkan terkait uji kompetensi peserta sebagai pengujinya dari pihak Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), kalau nanti peserta dinyatakan kompeten atau lulus mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ujarnya.

Menurut Basthomi terlihat peserta sangat antusias mengikuti pelatihan untuk servis motor sistem injeksi ini. Dikarenakan peluang pasarnya sangat bagus.

“Sekarang ini kebanyakan orang pa-

kai motor matic injeksi dan motor konvensional pabrik sudah tidak produksi. Karena sistem injeksi sendiri ramah lingkungan dan emisinya kecil,” imbuhnya.

Basthomi berharap setelah mendapatkan pelatihan dari BLK Kediri anak-anak dapat bekerja, karena kebanyakan peserta yang setelah dari sini pingin bekerja dan ingin wirausaha.

“Di tempat ini mereka kita bimbing dan skillnya digenot agar ilmunya terserap di pasar kerja, sehingga pro-

gram pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran bisa tercapai,” ungkapnya.

Salah satu peserta Agung Candra asal Kecamatan Kras Kabupaten Kediri mengaku motivasi ikut pelatihan servis sepeda motor ingin membuka usaha di bidang otomotif. Ia dulunya pernah merantau di Batam, dan ingin pulang ke Kediri menekuni pelatihan servis sepeda motor dan membuka usaha sendiri.

(adv/red)



Peserta sedang mengikuti pelatihan dipandu instruktur.

Cetak Lapangan Kerja Sendiri, BLK Kediri Gelar Pelatihan Perbaikan AC Residential



Peserta Pelatihan Perbaikan AC Residential sedang dibimbing instruktur.

KEDIRI, BN - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Kediri memberikan pelatihan perbaikan AC untuk rumah dan rumah sakit berlangsung selama 260 jam pelatihan di Jalan Pare Wates KM 1,5, Desa Gedangsewu Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (8/5/2025) pukul 09.30 WIB.

Pelatihan perbaikan AC itu tidak sulit seperti yang dibayangkan, setelah nanti mendapatkan pelatihan perbaikan AC di BLK Kediri. Nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri.

Fariz Pratama F.Zenrif, ST, selaku instruktur pelatihan kejuruan perbaikan AC menyampaikan untuk programnya sendiri namanya

Teknisi AC Residential untuk pelatihan servis AC ini dilakukan 260 jam pelatihan, ada industri, softskill serta materi yang diberikan tentang AC.

“Kita belajar bagaimana cara memasang AC dan mencuci AC serta memperbaiki kelistrikan sistem AC. Seperti, ada AC bocor dan kelistrikan bermasalah, sehingga mereka juga bisa memperbaiki,” ujarnya.

Lanjut Fariz bahwa untuk pelatihan disini masih pakai AC konvensional type standar, bukan menggunakan AC Inverter. Kita tahu AC Inverter ini membutuhkan teknologi sudah agak tinggi dan membutuhkan ketrampilan khusus untuk kelistrikan elektronika-elektronikanya.

Jadi anak-anak setelah pelatihan disini bisa kerja

terjun di lapangan bisa mencuci AC dan mengantikan kelistrikan sederhana serta bisa memasang AC. Anak-anak tidak harus menunggu lowongan pekerjaan di PT atau CV.

“Paling tidak anak-anak berwirausaha mandiri anak-anak sudah memiliki dasarnya dan gambaran nanti terjun langsung di lapangan,” ucapnya.

Fariz juga menuturkan memang pada awal usaha mandiri membutuhkan modal awal, tapi anak-anak bisa kerjasama dengan teman yang lain untuk bisa langsung kerja di lapangan.

“Untuk melakukan servis AC ini bisa menasar di permukiman rumah dan rumah sakit yang masih pakai AC Split,” tuturnya.

Saya berharap teman-teman yang sudah mendapatkan pelatihan servis AC, tentu saja ilmu yang didapat bisa diterapkan kalau cuman belajar kalau tidak diterapkan akan menguap juga, semakin diasah di lapangan dan untuk menajamkan keilmuannya perlu jam terbang.

“Semoga teman-teman disini setelah belajar di BLK Kediri bisa mempertajam ilmunya ketrampilannya dan memberikan penghidupan yang layak kedepannya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan selain pelatihan servis AC nanti mendapatkan ada dua sertifikat yang dikeluarkan dari BLK Kediri. “Ada jadwal uji kompetensi dari LSP, kalau mereka direkomendasikan kompeten baru mendapatkan sertifikat dari BNSP,” imbuhnya.

Salah satu peserta bernama Reviyan asal Blitar mengaku dulunya bekerja di bidang jual beli dan servis

komputer. Sekarang ini belajar dan memperbanyak pengetahuan tentang servis AC.

Ia sendiri sudah mulai bekerja freelance kalau ada kerusakan AC bisa panggilan memperbaiki AC dan sudah membuat banner di rumah untuk jasa servis AC.

(adv/red)



Para peserta terlihat sangat senang dan antusias mengikuti Pelatihan Perbaikan AC Residential.

Rakor Bumdesma Ngawi Rutin Diadakan Setahun 2 Kali, Tahun 2025 Telah Dilaksanakan di Rumah Makan Djoglo



Rakor Bumdesma digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ngawi di rumah makan Djoglo jalan PB Sudirman Ngawi pada 8 Mei 2025. (ashar)

berlaku dan berjalan pada riel yang ada sehingga Bumdesma tetap bertahan dan semakin lancar kegiatan yang otomatis kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat desa semakin yakin kepada kepengurusan Bumdesma.

“Terus lah berinovasi dalam membuka Sektor Riel yaitu misalkan pertokoan dan Pertashop serta lain nya sehingga kedepannya perputaran ekonomi semakin naik di masing-masing Bumdesma Kecamatan dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian kesejahteraan masyarakat desa,” kata Kabul dalam pidato pengarahannya.

“Kepada Bumdesma Kecamatan belum bisa berdiri betul dalam kinerja kerja nya dari beberapa sektor kegiatan, pertama kali tumbuhkan semangat kinerja tim dalam pengelolaan dan sangat perlu untuk belajar kepada Bumdesma Kecamatan lain yang sudah berjalan,” ucap Kabul.

Ketua Asosiasi Bumdesma Ngawi Gunawan mengutarakan harus dan wajib ada nya evaluasi terkait kinerja agar Bumdesma kedepannya jangan salah langkah dalam mengelola Bumdesma.

“Setiap ada kegiatan terobosan usaha yang baru sebelum nya urus terlebih dahulu kelengkapan administrasi perijinan dan bila sudah lengkap baru mendaftar sehingga dalam kegiatan usaha kita sudah ada Payung Hukumnya,” ucapnya pula

Prabowo Bidang Kerja sama DIPERMA memberikan keterangan bahwa antara Bumdesma dan Koperasi Desa (kopdes) Merah Putih merupakan kemitraan saling mendukung dan menunjang kedepannya meskipun Kopdes Merah Putih yang ada didesa-desa mulai dirintis dan kedepannya bila Kopdes nya sudah berdiri rintisan kemitraan akan berjalan. “Kedepannya, Bumdesma akan memperkecil sektor simpan pinjam nya dan memperbesar sektor rielnnya,” ungkap Prabowo

Akhir kata Prabowo mengutarakan, sekitar 19 Bumdesma yang ada dimasing-masing Kecamatan dalam rakor kemarin ada beberapa saja Bumdesma jadi perhatian sehingga perlu diadakan pelatihan dan pembinaan sehingga secepatnya bisa berjalan dan bangkit dari ketertinggalan minimal bisa menyamai Bumdesma lain nya, untuk itu pihak DISPERMA Kabupaten Ngawi selain monitor perkembangannya termasuk memberikan arahan dan masukan juga selalu memberikan semangat kepada pengelola agar selalu meningkatkan kinerja dengan selalu belajar dan belajar.

Mengutip dari pidato sambutan dan pengarahan Ony Bupati Ngawi dalam Gebyar Bumdesma DPMA (20-72024) di halaman Kantor Kecamatan Pitu mengungkapkan, para Bumdesma yang ada harus bisa menyelesaikan persoalan masyarakatnya terkait fasilitas, pembayaran listrik, pajak, PBB, pupuk dan lain sebagainya sehingga masyarakat bisa dengan mudah dan terjangkau dalam pelayanan nya.

(Adv/Ashar)



Proyek Rekonstruksi Jalan Kending-Kwadungan Tahap II Mulai Dilaksanakan



Tampak proyek Rekonstruksi Jalan Kending-Kwadungan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi Tahap 2 sedang dikerjakan kontraktor pelaksana PT. Kali Suruh. (ashar)

□ Dinas PUPR Ngawi Bidang Bina Marga Kucurkan Anggaran Rp 30,8 M

NGAWI, BN - Dinas PUPR Kabupaten Ngawi melewati Bidang Bina Marga untuk Tahun 2025 mulai melaksanakan salah satu nya ialah Rekonstruksi Jalan Kending-Kwadungan di Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi Tahap ke 2 berupa pekerjaan Rijk atau Aspal Beton sepanjang kurang lebih 5,5 Kilometer dan sebagian Drainase dalam waktu 240 hari dengan anggaran kontrak sebesar Rp. 30.800.000,- (Tiga puluh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)

Pelaksanaan pekerjaan tentu saja diiringi dengan jalan alternatif bagi pengguna jalan tersebut agar pengendara bermotor tidak terganggu dalam akses setiap hari nya meskipun jalan alternatif itu masuk kampung, demikian keterangan Rachmat Fitrianto, ST, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Ngawi saat di ruang kerjanya. “Sepanjang jalan Kending-Kwadungan ketinggian jalan ditambah dari jalan yang lama dan selain itu pembangunan Talud dan perbaikan Drainase sebagian saja khusus nya di area langganan banjir,” kata Rahmad.

Rachmat pun mengutarakan harapan dari Dinas PUPR dimana pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi Jalan Kending-Kwadungan berjalan lancar sesuai dengan perencanaan bisa memperbaiki jalan yang rusak dan karena itu daerah banjir maka perlu di angkat lebih tinggi dari kondisi jalan sekarang ini sebelum dikerjakan. “Harapan kedua ketika proyek pekerjaan ini selesai kepada pengguna jalan jangan dibuat kebut-kebutan/balapan karena dengan jalan yang mulus pada proyek jalan tahun kemarin sering terjadi kecelakaan sehingga diharapkan peran serta masyarakat dalam kerja sama nya dalam proses pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut hingga selesai pembangunan maka kedepannya jalan tersebut bisa memperlancar akses bagi masyarakat sekitarnya dalam peningkatan roda perekonomian dan ataupun para pengguna jalan itu bisa memperlancar akses tujuan nya dengan lebih lancar,” ucap Rachmat pula

Purwanto karyawan PT. Kali Suruh menyampaikan, dari Gapura desa Simo ke Timur sampai desa Kwadungan sepanjang 2,726 Kilometer awal pelaksanaan jalan Rijk dan pembangunan Talud dan memperbaiki sebagian Drainase untuk memperlancar arus air saat musim hujan.

Lanjut nya pula lebar 6 meter jalan tersebut ditambah 1 meter kanan kiri jalan berupa Berem yang juga di beton. Sementara ini drainase yang direhab baru sepanjang 150 meter dan Talud.

“Peninggian jalan dengan menggunakan urukan & LPH sehingga ketebalan Uruk dan ketebalan Rijk 20 Sentimeter tidak sama sepanjang 5,50 Kilometer yaitu antar 30 Sentimeter hingga 65 sentimeter termasuk ketebalan Rijk tergantung lokasi jalan tersebut,” ucap Puryanto

Puryanto menambahkan bahwa untuk penebangan pohon itu tidak semua nya di tebang sepanjang jalan tergantung pohon tersebut mengganggu jalan selebar total 8 meter atau tidak dan bila mengganggu pohon itu pun dipangkas atau di potong.

Ana pemilik warung makanan dan minuman di perempatan jalan/desa Kending ikut merasa bersyukur dan ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ngawi khusus nya Dinas PUPR Kabupaten Ngawi atas terlaksananya perbaikan jalan tersebut dan semoga dalam proses pelaksanaan benar-benar diawasi dengan ketat agar kualitas jalan sesuai yang ada.

Umar salah satu warga di desa Dindeng sebagai pengguna akses jalan merasa senang sekali atas perbaikan jalan. “Sudah hampir 20 tahun lama nya menggunakan jalan sebagai akses kegiatan selalu terhambat karena jalan rusak dan sebagian sudah berlubang sehingga musim hujan jalan yang berlubang tergenang air dimana saat itu pengguna jalan itu tidak hati-hati akan jatuh dan celaka,” ucap nya pula.

Jumino sebut nama nya warga desa Simo selain peningkatan akses jalan pemerintah Kabupaten Ngawi juga membangun Talud dan memperbaiki Drainase sehingga saat musim hujan bisa mengurangi banjir dan syukur-syukur tidak banjir lagi kedepannya untuk pelaksanaan itu mengucapkan terima kasih. (Adv/Ashar)



INFO DPRD KOTA BANDUNG

Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya: Hari Pendidikan Nasional Jangan Sekedar Seremoni



Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, bersama Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya saat menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025, di Lapangan Rindam III/Siliwangi, Jumat 2 Mei 2025.

BANDUNG, BN - DPRD Kota Bandung akan terus mendukung program-program strategis di bidang pendidikan, termasuk peningkatan kualitas guru, infrastruktur sekolah, serta perluasan

akses pendidikan yang merata dan adil bagi seluruh warga Kota Bandung.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, S.E., S.H., saat menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025, yang digelar di Lapangan Rindam III/Siliwangi, Jumat 2 Mei 2025.

Upacara ini merupakan momen penting untuk memperingati jasa Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional serta menguatkan kembali komitmen bersama dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung.

Upacara dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat pemerintahan, perwakilan TNI/Polri, tenaga pendidik, serta pelajar dari berbagai sekolah di Kota Bandung. Bertindak sebagai inspektur upacara yaitu Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, SH., MM, yang menyampaikan amanat pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan mutu pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Toni Wijaya menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

"Hari Pendidikan Nasional bukan sekedar seremoni, tetapi momentum untuk merefleksikan kembali sejauh mana komitmen kita terhadap kemajuan pendidikan, terutama dalam menghadapi

tantangan zaman yang terus berubah," ujarnya.

Toni juga menyampaikan harapannya agar semangat peringatan Hardiknas ini tidak hanya menjadi perayaan simbolik, tetapi juga dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam membangun pendidikan yang adil, merata, dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

"Kami berharap seluruh pihak, baik pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat luas, terus memperkuat sinergi demi mencetak generasi penerus yang cerdas, berkepribadian, dan siap bersaing di tingkat global," ujarnya.

Sesuai upacara, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya bersama jajaran turut meninjau langsung program Barak Militer yang dijalankan di lingkungan Rindam III/Siliwangi.

Program ini merupakan salah satu upaya pembinaan karakter dan pemulih jati diri bagi para remaja bermasalah di Kota Bandung. Melalui pendekatan disiplin, pembinaan mental, dan pelatihan fisik, program ini diharapkan mampu mengembalikan semangat kebangsaan serta nilai-nilai positif dalam diri generasi muda.

"Program Barak Militer ini merupakan langkah konkret dalam memberikan kesempatan kedua bagi remaja yang sempat tersesat jalan. Kami mendukung penuh inisiatif ini karena berkontribusi langsung pada pembentukan karakter dan masa depan mereka," kata Toni. (ADV/San)



Wakil Ketua DPRD Jombang Syarif Hidayatullah (Gus Sentot). (tok)

JOMBANG, BN - Praktik jual beli proyek di pihak ketiga kan sebagai salah satu

DPRD Jombang Soroti Dugaan Praktik Jual Beli Proyek Desa

bentuk korupsi yang perlu di waspadai. Maraknya dugaan adanya praktik jual beli proyek desa yang bikin geram masyarakat Jombang ini sering terjadi. Biasanya terjadi di desa desa yang mendapatkan proyek swakelola, dan melibatkan pihak ketiga. Kejadian adanya

proyek desa di pihak ketiga menarik perhatian, dan agar pihak legislatif segera mendesak Inspektorat segera turun ke lapangan untuk memastikan adanya kabar tersebut.

Selain itu Wakil Ketua DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah atau dipanggil Gus Sentot, menyatakan dukungannya terhadap langkah Inspektorat untuk me-

nyelidiki seluruh desa yang diduga memperjualbelikan proyek desa. "Jangan hanya memeriksa administrasi. Inspektorat harus turun langsung ke lokasi proyek," ujar Gus Sentot, (Rabu, 23/4/2025).

Sedangkan Gus Sentot sendiri menilai pentingnya tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait dugaan dominasi proyek oleh oknum tertentu. Ia kha-

watir jika tidak segera ditindaklanjuti, kabar adanya proyek swakelola di pihak ketiga kan akan bisa merusak kepercayaan publik.

Bahkan Gus Sentot juga mengingatkan bahwa jika pengawasan tidak segera dilakukan, semangat pemerintahan bersih akan tercoreng. Untuk itu Anggota legislatif yang merakyat ini mengajak semua pihak men-

dukung agenda anti pungli dan praktik kotor lainnya yang menjadi komitmen pemerintah daerah.

Disampaikan oleh nya lagi bahwa, "Pak Bupati dan Wabup terbuka terhadap laporan masyarakat. Jika ada indikasi, segera selidiki dan ambil langkah tegas," ungkapnya.

Selanjutnya di katakan-nya, bahwa pentingnya pe-

nelusuran langsung ke lokasi proyek untuk memastikan kualitas pembangunan. Tanpa pengecekan lapangan, dikawatirkan pengerjaan proyek bisa melanggar prosedur yang berdampak pada kualitas. Termasuk DD (Dana Desa) bersifat swakelola tidak boleh di pihak ketiga-kan, kecuali dalam kondisi tertentu dan dengan prosedur yang transparan. (Tok/adv)

DPRD Kab Bogor Gelar Rapat Paripurna, Bahas Propemperda 2025 dan Rekomendasi LKPJ 2024



Rapat Paripurna DPRD Kab Bogor. (emi)

BOGOR, BN - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor lakukan Rapat Paripurna untuk menetapkan agenda penting yang mencakup Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, Penetapan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, serta Penutupan Masa Persidangan Kedua dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2024-2025. Yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, pada Jumat (9/5/25).

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas terlaksananya agenda penetapan perubahan Propemperda Tahun Anggaran 2025. Perubahan ini merupakan tindak lanjut terhadap ketentuan perundang-undangan, hasil evaluasi kementerian terkait, serta rekomendasi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

"Usulan perubahan Propemperda ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bogor. Kami mengusulkan 10 Raperda atas prakarsa pemerintah daerah dan 3 Raperda inisiatif DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama," ujar Bupati Rudy Susmanto.

Raperda yang diusulkan pemerintah antara lain mencakup pengelolaan APBD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, penyertaan modal daerah, hingga perubahan atas Perda tentang pajak dan retribusi daerah. Sementara Raperda inisiatif DPRD meliputi penghormatan hak penyandang disabilitas, perlindungan sumber daya air, dan pengelolaan sampah.

Terkait penetapan keputusan DPRD terhadap

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Wabup Lambar Tegaskan, Juleha Bukan Sekedar Profesi Tapi Amanah Spiritual



Wabup Lambar Mad Hasnurin saat melantik DPD Juleha Kabupaten Lampung Barat Periode 2025-2027 di SMK dan SMA IT Dar El Fathan School, Kawasan Sekuting Terpadu, Pekon Watas, Balik Bukit, Sabtu 3/5/2025. (Taufik)

nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penyembelihan hewan yang sesuai dengan kaidah syariah dan standar kehalalan.

Ia juga menekankan bahwa menjadi Juleha tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan spiritual. "Melalui pelatihan ini, saya berharap para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga memahami tanggung jawab moral dan spiritual yang melekat pada profesi ini," ujarnya.

"Kita ingin ke depan, tidak ada lagi keraguan dari masyarakat terhadap kehalalan produk hewani yang beredar, khususnya di wilayah Lampung Barat," tambahnya.

Sebanyak 120 peserta dari 15 kecamatan yang ada di kabupaten Lampung Barat resmi dilantik oleh Ketua DPW Juleha Provinsi Lampung, Saluddin, yang juga menjadi salah satu narasumber pelatihan. Ketua DPD Juleha Lampung Barat yang baru, Abdul Rosyid, mengajak seluruh pengurus dan peserta untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam mengemban amanah ini. (Taufik)

LAMPUNG BARAT, BN - Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menegaskan pentingnya peran Juru Sembelih Halal (Juleha) sebagai garda terdepan dalam menjamin kehalalan produk hewani yang dikonsumsi masyarakat.

Pernyataan ini ia sampaikan saat menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan Pelantikan DPD Juleha Kabupaten Lampung Barat Periode 2025-2027 serta Pelatihan Juleha Berbasis Kompetensi Tahun 2025 di SMK dan SMA IT Dar El Fathan School, Kawasan Sekuting Terpadu, Pekon Watas, Balik Bukit, Sabtu 3/5/2025.

Dalam sambutannya, Wabup Mad Hasnurin mengapresiasi pelatihan ini sebagai langkah



Milangkala Pemdes Pamulihan Ke-320, Meriah

□ Kades H.Darwin Suparja : Momentum Tingkatkan Semangat Gotong royong Membangun Desa

KUNINGAN, BN - Dalam rangka memperingati Milangkala Desa Pamulihan yang ke-320, berbagai kegiatan meriah digelar di lapangan desa. Pamulihan Kecamatan Cipicung acara milangkala tersebut berlangsung pada Rabu (30/4/2025) dengan tema "Bersama Membangun Masa Depan pemdes Pamulihan Jaya, Maju dan Sejahtera".

Acara Milangkala Desa Pamulihan ke-320 ini dihadiri oleh Unsur Muspika, Kapolsek, Danramil BPD, LPM, ratusan warga masyarakat, tokoh masyarakat, Karang Taruna, serta perwakilan dari pemerintah daerah. Acara ini menjadi bukti nyata kesatuan dan kebersamaan masyarakat Kuningan dalam merayakan sejarah dan membangun masa depan yang lebih baik.

Acara Milangkala ini dirangkaikan dengan Pematangan Tumpeng, pertunjukan seni budaya yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari anak-anak sekolah, remaja, hingga tokoh masyarakat. Pertunjukan ini menampilkan berbagai kesenian tradisional yang menjadi ciri khas



Kades Pamulihan H.Darwin Suparja. (Ed)

Desa Pamulihan

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan perayaan Botram atau biasa disebut istilah Tradisi makan bersama yang populer di kalangan masyarakat Sunda dan doa bersama masyarakat, agar senantiasa Pemdes Pamulihan senantiasa diberikan keberkahan dan kemajuan serta Jaya Selalu.

Sebagai puncak acara, digelar Tabligh akbar yang memiliki banyak manfaat, diantaranya meningkatkan

keimanan dan ketaqwaan, memperluas pengetahuan tentang ajaran Islam, serta meningkatkan semangat persatuan dan kebersamaan antar umat Islam.

Kepala Desa Pamulihan H.Darwin Suparja dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas perjalanan Desa Pamulihan selama 320 tahun. Beliau berharap, Milangkala Desa Pamulihan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat gotong royong dan membangun desa yang lebih baik, jelasnya.

(Ed)

Serahkan SK Kenaikan Pangkat, Wabup Harapkan ASN Beltim Lebih Disiplin dan Profesional

MANGGAR, BN- Wakil Bupati Belitung Timur (Wabup Beltim) Khairil Anwar menyerahkan 72 petikan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Beltim. Penyerahan SK kenaikan pangkat dilakukan di ruang Satu Hati Bangun Negeri, Kantor Bupati Beltim, Kamis (9/5).

Dalam sambutan acara penyerahan petikan keputusan kenaikan pangkat periode Juni 2025 tersebut, Wabup Khairil Anwar mengucapkan selamat untuk para ASN yang menerima SK kenaikan pangkat.

"Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan dari negara atas hasil kerja, loyalitas, dan integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab," kata Khairil



Wabup Beltim Khairil Anwar saat menyerahkan 72 petikan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat bagi ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Beltim.

Anwar.

Melalui momentum ini, kata Wabup Khairil, menjadikan motivasi dan penyemangat bagi para pegawai untuk meningkatkan prestasi, dedikasi serta pengabdian terhadap masyarakat dan negara dengan selalu mengedepankan disiplin dan etos kerja. "Dengan naik pangkat, mereka harus lebih disiplin, profesional dan taati aturan dalam bekerja," ujarnya.

Peserta kenaikan pangkat periode Juni 2025 ini sebanyak 72 orang. Dengan rincian, golongan IV/c sebanyak 3 orang dan golongan III/d ke bawah sebanyak 69 orang. Hadir juga dalam acara itu para pejabat di lingkup Pemkab Beltim dan para pegawai lainnya.

(diskominfobeltim/as)

KONI Paparkan Rencana Kerja 2026 - 2029 Kepada Pemkab Beltim



Wakil Bupati Beltim, Khairil Anwar di Ruang Kerjanya. (ist)

MANGGAR, BN - KONI Kabupaten Belitung Timur (Beltim) melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Beltim, Khairil Anwar di Ruang Kerjanya, Rabu (30/4/25) Pagi. Audi-

ensi ini untuk menyampaikan rencana Program dan Anggaran Hibah KONI Beltim 2025 - 2029 serta pencarian anggaran di luar hibah.

Ketua Umum KONI Beltim, Hendro dan 10 orang pengurus inti KONI Beltim lainnya memaparkan rencana kerja dan anggaran untuk empat tahun ke depan. Termasuk pula persiapan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Kepulauan Bangka Belitung pada 2026 mendatang.

Hendro didampingi Sekretaris KONI Beltim, Febriawan menyatakan Audiensi berisi paparan program dan kegiatan KONI Beltim dalam kurun jangka pendek dan jangka menengah bidang keolahragaan. KONI Beltim ingin adanya transparansi dalam setiap penggunaan dana hibah yang diberikan pemerintah. "Kita ingin memberikan gambaran dan transparansi terkait program dan anggaran yang akan kita gunakan ke depan. Tujuannya agar Pemerintah tahu serta mendukung program kerja KONI untuk meningkatkan prestasi dan pengembangan olahraga di Kabupaten

Beltim," kata Hendro.

Sementara itu Wakil Bupati Beltim, Khairil Anwar mengakui jika anggaran hibah yang diberikan Pemkab Beltim kepada KONI, sebesar Rp1,1 milyar di tahun 2025 ini masih jauh dari cukup. Mengingat banyak program kerja yang harus dilaksanakan untuk persiapan Porprov VII mendatang.

"Kalau ingin prestasi tinggi, tidak mungkin dengan dana hibah yang sekarang. Kalau saya lihat pemaparan tadi belum termasuk untuk pembinaan atlet persiapan porprov," kata Khairil.

(diskominfobeltim/as)

Wakil Bupati Sudirman Bungsi Lepas Jamaah Calon Haji Kabupaten Pinrang



Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungsi, S.IP., M.Si., saat melepas jamaah calon haji di Masjid Agung Al-Munawwir, Kamis (1/5/2025). (ist)

PINRANG, BN - Sebanyak 368 orang Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Pinrang dilepas secara resmi oleh Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungsi, S.IP., M.Si., dalam sebuah seremoni pelepasan yang berlangsung khidmat di Masjid Agung Al-Munawwir, Kamis (1/5/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sudirman me-

nyampaikan rasa syukur dan harapan besar atas keberangkatan para jamaah yang tergabung dalam Kloter 2 Embarkasi Sultan Hasanuddin.

Dirinya berpesan agar para jamaah senantiasa menjaga kelengkapan administrasi sebelum berangkat ke tanah suci. Menurutnya, hal ini penting karena menyangkut keabsahan dokumen

imigrasi yang menjadi syarat utama dalam perjalanan internasional.

Wabup juga menekankan pentingnya menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan rangkaian rukun ibadah haji. "Ibadah haji bukan hanya membutuhkan kesiapan mental, tapi juga fisik yang kuat. Oleh karena itu, para jamaah diharapkan menjaga kesehatan sejak dini agar setiap rukun ibadah dapat dilaksanakan dengan lancar," ujarnya.

Wabup Sudirman pun mengingatkan agar seluruh jamaah fokus pada pelaksanaan ibadah dengan mengesampingkan urusan duniawi selama berada di tanah suci. "Manfaatkan momen berharga ini dengan sebaik-baiknya, utamakan ibadah, perkuat niat, dan jaga kekompakan antarjamaah," tambahnya.

Tak lupa, Wabup Sudir-

man berpesan kepada ketua utama rombongan, ketua kloter, ketua rombongan, dan para pendamping agar senantiasa sigap dalam membantu serta memperhatikan kondisi jamaah selama pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji.

Dirinya berharap seluruh rangkaian ibadah dapat dilalui dengan baik, dan seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan berkumpul kembali bersama keluarga.

Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda, Asisten Pemerintahan dan Kesra H.Syahrudin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang H. Irfan Daming, Ketua MUI KH. Abd. Salam Latarebbi, Ketua Baznas H. M. Taiyyeb, serta sejumlah pihak terkait lainnya yang ikut mendoakan keselamatan dan kelancaran perjalanan ibadah para jamaah calon haji. (sabit)

Dirut Perusda Air Minum Wae Manurung Hadiri Silaturahmi Ketua ANPS Dengan Bupati Bone di PPI Lonrae



Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. didampingi Direktur PDAM Bone Bachtiar Sairing saat silaturahmi bersama nelayan dan pengusaha kapal.

BONE, BN - Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. didampingi Direktur PDAM Bone Bachtiar Sairing melaksanakan silaturahmi bersama nelayan dan pengusaha kapal, Rabu (30/4/2025).

Kegiatan berlangsung di Pelabuhan Ikan Pangkalan Pelabuhan Ikan (PPI) Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Turut hadir Direktur

Utama Perumda Air minum wae Manurung Bachtiar Sairing, S.Sos. Mendampingi Bupati Bone, Kapolres Bone AKBP Sugeng Setyo Budi, Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bone H. Amirat, S.Sos., M.Si., Camat Tanete Riattang Timur Dr. Andi Iqbal Walinono, SE, M.Si, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan A Rizky Pratama, S.STP, Kepala UPT Lonrae Dinas Perikanan dan Kelautan Bone Sofyan, S.Sos dan Lurah.

Kepala UPT Pelabuhan Cabang Sulsel, Kepala Cabang Dinas Bosowasi, Kasat Pol Air Laut, Pengusaha Kapal H. Asnawi. Plt Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone H. Amirat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Bone atas kehadirannya hadir silaturahmi temu nelayan.

Ketua Asosiasi Nelayan Purse Seine (ANPS) Bone H.Asnawi alias H.Wawi didampingi H.Darjun bendahara ANPS Bone saat ditemui mengatakan keluhan para nelayan di PPI Lonrae terkendala soal perizinan kapal yang dikeluarkan kementerian perikanan dan kelautan yang kantor nya tidak ada di Bone sehingga banyak nelayan ditangkap di daerah Sultra.

Lanjut H.Wawi mengatakan kami ini orangnya Bupati Bone, ada kurang lebih 200 kapal nelayan yang ada di PPI Lonrae dan hampir semua fasilitas pemerintah di PPI Lonrae seperti jalanan rusak, lampu penerangan jalan, tiang lampu saya perbaiki dengan swadaya dengan nelayan.

Bupati Bone Andi Asman Sulaiman meminta seluruh pejabat dan nelayan di pelabuhan Lonrae diaktifkan kembali, jangan bawa keluar hasil tangkapan ke daerah lain untuk menekan operasional yang tinggi," tuturnya.

Bupati Bone juga meminta jajaran kelautan dan perikanan, mulai pusat, provinsi, hingga kabupaten untuk bahu membahu membantu nelayan di Kabupaten Bone.

"Silahkan melaut cari rejeki ta dengan cara yang halal, jangan yang melanggar hukum, agar seluruh kegiatan yang kita lakukan agar menjadi berkah," kata Bupati Bone. (Suspi)

Bupati Pimpin Rakor Kades dan BPD se Beltim



Bupati Kamarudin Muten saat memimpin Rakor Kades dan BPD se Beltim.

MANGGAR, BN - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Beltim dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintahan desa serta peningkatan kemandirian ekonomi desa.

Rakor itu dipimpin oleh Bupati Kamarudin Muten bertempat di Auditorium

Zahari Mz, Manggar, Senin (5/5). Bupati Beltim Kamarudin yang akrab disapa Afa mengatakan rakor dilaksanakan agar dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan untuk kemajuan bersama.

"Saya harap kita meningkatkan sinergi, komunikasi dan koordinasi untuk mencapai Kabupaten Beltim yang Nyaman dan Berkemajuan," kata Bupati Afa dalam sambutannya.

Berbagai hal dibahas dalam rakor tersebut antara lain, perbaikan kinerja kepala desa beserta perangkat desa mulai dari disiplin jam kerja sesuai ketentuan, perubahan pola pikir dan perilaku kerja agar pelayanan bagi masyarakat dapat optimal.

Lalu, kebersihan kantor desa dan lingkungan desa termasuk kebersihan sarana publik yang ada di desa. Pembahasan penyelesaian penetapan batas desa, rencana pemekaran yang diwacanakan oleh beberapa desa.

Kemudian membahas terkait peningkatan kemandirian ekonomi desa hingga terkait program Tim Pengerak PKK yang sekaligus program Tim Pembina Posyandu Kabupaten Beltim.

Acara itu dihadiri Wakil Bupati Beltim Khairil Anwar, Kepala Kejaksaan Negeri Beltim yang diwakili Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Beltim Ahmad Muzayyin, Sekretaris Daerah Kabupaten Beltim Mathur Noviansyah, Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum Ida Lismawati, Inspektur Daerah Kabupaten Beltim Haryanto. (diskominfobeltim/as)

UPT SMPN 5 Pinrang Sukses Raih Juara Umum dan Piala Bergilir di GABSEN III Ajatappareng 2025

PINRANG, BN - Pada 24 April 2025 Prestasi gemilang kembali ditorehkan UPT SMPN 5 Pinrang dalam ajang GABSEN III (Gelar Bhakti Season III) yang diselenggarakan oleh PMR Wira SMK Negeri 8 Tiroang Pinrang. Dalam kompetisi tingkat Madya se-Ajatappareng ini, tim PMR SMPN 5 Pinrang berhasil meraih Juara Umum 1 sekaligus membawa pulang Piala Bergilir, mengukir sejarah baru bagi sekolah mereka.

Kegiatan yang berlangsung di Komplek SMKN 8 Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang ini, mengangkat tema "Kepalangmerahan Membangun Generasi Muda dan Menumbuhkan Rasa Sosial". Kompetisi ini diikuti oleh tujuh kelompok dari tingkat SMP dan MTs se-Ajatappareng. Meski beberapa sekolah absen karena fokus pada persiapan ujian, acara tetap berlangsung meriah dan kompetitif.

GABSEN III resmi dibuka oleh Bapak Zaenal Hafid selaku Inspektur Upacara mewakili PMI Cabang Pinrang, didampingi Kepala SMKN 8, A. Nasruddin. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya semangat kepalangmerahan, sportivitas, serta menjaga kewajiban beribadah selama acara. Namun, pantauan Wartawan di lapangan menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran peserta dalam melaksanakan shalat berjamaah sesuai arahan yang diberikan, hal ini disebabkan para panitia pelaksana juga tidak ada perhatian untuk mengajak para peserta melaksanaka sholat 5 waktu

secara berjamaah di Musollah yang ada di siapkan, hal ini perlu evaluasi lagi dari PMI Cabang Pinrang dan yang berwenang.

Prestasi Membanggakan UPT SMPN 5 Pinrang

Pada penutupan acara, Minggu (27/04) sore menjelang Maghrib, diumumkan hasil lomba dengan UPT SMPN 5 Pinrang keluar sebagai Juara Umum 1 dengan perolehan 200 poin. Mereka menerima piala utama, piala bergilir, serta sertifikat penghargaan. Kemenangan ini membuat suasana haru menyelimuti para peserta dan pembina, yang menyaksikan momen bahagia penuh tangis haru dari tim SMPN 5.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan pembinaan intensif dari para pembina: Ibu Hasima, S.Pd, Sahara, S.Pd, Nur Hidayatullah, S.Pd, Kasmawati, S.Pd, Abdullah, S.Pd, Taufik, AT.SSi, Muh Wahyudi, S.Pd.

Daftar Prestasi yang Diraih Tim SMPN 5 Pinrang: Juara 1 Dapur Kreasi, Juara 2 Pasang Bongkar Tenda Putra, Juara 2 Pasang Bongkar Tenda Putri, Juara 1 Instagram Contest, Juara 1 Pasang Bongkar Tandu Putra, Juara 1 Pasang Bongkar Tandu Putri, Peringkat 1 Traveling Putri, Juara 2 Cerdas Cermat, Juara 1 Ranking 1, Peringkat 2 Traveling Putra, Juara 3 Outbond, Juara 2 Mading 3D, Juara Umum 1 dan Peraih Piala Bergilir, Selain UPT SMPN 5 Pinrang, posisi Juara Umum 2 diraih oleh PMR SMPN 2 Pinrang dengan 164 poin, sementara Juara Umum 3 jatuh kepada PMR MTs DDI Parepare dengan 149 poin. Masing-masing juga berhak atas piala utama dan sertifikat.



Piala yang diraih UPT SMPN 5 Pinrang. (sabit)

Penyelenggaraan GABSEN III SMK 8 Berjalan Lancar

Selama kegiatan, acara berlangsung sukses tanpa kendala berarti. Para pengamat, pembina PMR, anggota KSR, serta PMI Cabang Pinrang berharap agar kegiatan serupa terus dilaksanakan secara rutin untuk mendukung perkembangan karakter generasi muda di bidang sosial dan kepalangmerahan.

Dukungan Sponsor

Suksesnya GABSEN III ini tak lepas dari dukungan sponsor pengusaha lokal, di antaranya: Nirwana Kosmetik, UD 46 MRC Family, Goeboek Digital Printing, Maroa Project, Sambil Ramé, Mahkota Catering Service, Outdoor, Dirga Cell, AE PRSI 7 Family Dia Putri, Toko Sembako Al-Falah (Dolangeng Makkawaru Mattiro Bulu Pinrang), STA Aressie Toe Lylo, Tiroang Motor (Penjual Alat Mobil, Jl. Andi Pettarani Rappang). (sabit)

Bupati Lambar Parosil Mabsus Sangsi 5 Oknum Kasek Indisipliner

LAMPUNG BARAT, BN - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus memberi teguran keras dan sangsi terhadap lima oknum Kepala Sekolah yang indisipliner pada saat upacara perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ke-66 yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati setempat, Senin 05/5/2025.

Kelima oknum Kepala Sekolah tersebut adalah Yudison SDN 1 Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Kusnan SDN 1 Lumbok Timur Kecamatan Lumbok Seminung, Uliyani SDN 1 Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung, Elli Suarni SDN 1 Heniarong Kecamatan Lumbok Seminung, Edulis SDN 1 Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus merasa miris,



Bupati Lambar Parosil Mabsus saat memimpin upacara Hardiknas ke-66 di halaman depan Kantor Bupati, Senin 05/5/2025. (taufik)

pasalnya pada peringatan Hardiknas tingkat Kabupaten Lampung Barat terdapat lima orang Kepala Sekolah yang datang terlambat. Kelima Pejabat tingkat Sekolah Dasar itu bukan segera mengikuti barisan peserta upacara namun justru berpoto selfie terlebih dahulu.

Melihat tingkah laku kelima Kepala Sekolah itu, Parosil Mabsus merasa miris, sebab menurutnya profesi guru seharusnya merupakan contoh tauladan bagi siswa.

"Kalau kita ingin dihargai jadilah contoh yang baik bagi anak-anak kita, bagaimana kita akan memberikan evaluasi dan dihargai oleh anak-anak kita jika kita hanya bisa bicara tetapi tidak bisa memberikan bukti nyata," ucap Parosil Mabsus. (taufik)

Bupati Asahan Percepat Rencana Pembangunan Lapas

ASAHAN, BN - Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si akan mempercepat rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di Desa Pasar Lembu Kecamatan Air Joman.

Hal ini disampaikan Bupati saat menerima kunjungan Kepala Lapas Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara. "Saya sangat mendukung program pembangunan Lapas ini. Dan dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi dengan Menteri terkait," ungkap Bupati pada Jumat (25/04/2025) di ruang kerja rumah dinas Bupati Asahan.

Selain itu, Bupati juga berharap dari pihak Lapas Labuhan Ruku untuk segera mempersiapkan segala dokumen pendukung pembangunan Lapas tersebut. Dengan adanya Lapas ini dapat membantu Pemkab Asahan dalam mewujudkan visi dan misinya "Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan".



Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, saat menerima Kepala Lapas Labuhan Ruku, S Berutu, Kasi Adm Kamtib Haris Damanik dan Kasubag TU Suriawan di ruang kerja bupati. (tp)

"Saya berharap surat surat untuk pendukung pembangunan sudah siap semua, sehingga kita akan segera lakukan koordinasi," ucap Bupati. Sementara itu, Kepala Lapas Labuhan Ruku, S Berutu didampingi Kasi Adm kamtib, Haris Damanik dan Kasubag TU, Suriawan mengucapkan terimakasih kepada Bupati yang berjanji akan segera mendukung pembangunan Lapas Kabupaten Asahan dan program Lapas.

Kepala Lapas menjelaskan bahwa jumlah warga binaan di Labuhan Ruku sudah melebihi kapasitas, bahkan untuk Sumatera Utara, Lapas Labuhan Ruku termasuk Lapas yang over kapasitas.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi, Sekda Asahan, Drs. Zainal Arifin Sinaga, MH, Asisten Administrasi Umum, Drs. Muhili Lubis, MM, Kadis Kominfo, Jutawan Sinaga, S.STP., MAP, Kabag Protokol, Darwinsyah Lubis, S.STP. (T.P)

BBWS Citanduy Sosialisasikan Perbaikan Saluran Irigasi di Lakbok



Sosialisasi tata guna air dan rencana perbaikan saluran Sier serta pintu-pintu klep di Aula Kecamatan Lakbok, Rabu (7/5).

CIAMIS, BN - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy menggelar sosialisasi terkait tata guna air dan rencana perbaikan saluran Sier serta pintu-pintu klep di Aula Kecamatan Lakbok, Rabu

(7/5). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Ciamis.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Direktur Utama Irigasi Kementerian

Pertanian, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, Kapolsek Lakbok, Camat Lakbok, Kabid Perencanaan BBWS SDA OP 2, Sater SDA OP 2, serta PPK SDA OP 2 Yahya. Hadir pula Kepala Desa Lakbok dan Kepala Desa Purwadadi.

Dalam pemaparannya, PPK SDA OP 2 Yahya menyampaikan bahwa mulai tahun ini pengelolaan pemeliharaan rutin saluran irigasi yang sebelumnya berada di bawah kewenangan SDA Provinsi, kini telah dialihkan ke BBWS Citanduy. "Peralihan ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan dan efisiensi pengelolaan air irigasi yang lebih terinte-

grasi," ujarnya.

Yahya juga menekankan pentingnya sinergi antara semua unsur, khususnya petani dan masyarakat Lakbok, dalam menjaga kelestarian dan fungsi sistem irigasi. "Sinergitas ini mutlak dibutuhkan agar program perbaikan saluran dan pintu klep berjalan optimal, serta mampu mendukung peningkatan produksi pertanian," tambahnya.

Dengan perbaikan yang direncanakan, diharapkan distribusi air ke lahan pertanian dapat lebih lancar, sehingga produktivitas pertanian meningkat dan ketahanan pangan daerah semakin kuat.

(Asep Sujana)

Hardiknas, Pemkab OKI Siapkan Rp 3 M untuk Program Seragam Sekolah Gratis

OKI, BN - Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Pemerintah Kabupaten OKI, melalui Dinas Pendidikan menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk program seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu.

Program ini merupakan janji kampanye Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, dan Wakil Bupati, Supriyanto. Bupati Muchendi Mahzareki menyatakan bahwa program ini akan dimulai pertengahan tahun 2025 dan dana sudah dialokasikan. "Dananya sudah kita alokasikan untuk program tersebut," kata Bupati usai upacara Hari Pendidikan Nasional di halaman Kantor Bupati OKI, Rabu (7/5/25).

Kepala Dinas Pendidikan OKI, Muhammad Refly, menambahkan bahwa anggaran Rp 3 miliar tersebut akan digunakan untuk 1000 siswa pada tahap pertama, baik tingkat SMP maupun SMA. "Itu tahap pertama sudah kita anggarkan untuk 1000 siswa," tambah Refly.

Program seragam sekolah gratis ini disambut baik oleh



Bupati Muchendi Mahzareki usai upacara Hari Pendidikan Nasional di halaman Kantor Bupati OKI, Rabu (7/5/25). (Nurlis)

Ketua K3S Kecamatan Lempuing, Annas, yang menilai bahwa bantuan ini sangat positif untuk meringankan beban orang tua siswa.

Dengan program ini, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten OKI dapat meningkat dan lebih banyak siswa yang dapat merasakan manfaatnya. Dalam kesempatan itu Bupati Muchendi memberikan bantuan dan penghargaan kepada para guru dan siswa ber-

prestasi sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas dedikasi dan prestasi yang telah diraih oleh para guru dan siswa. Dengan pemberian bantuan dan penghargaan ini, Bupati berharap dapat memotivasi para guru dan siswa untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kab OKI.

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap dedikasi dan prestasi yang telah diraih oleh para guru dan siswa. Kami berharap dengan pemberian penghargaan ini dapat memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten OKI," ujar Bupati. (Nurlis)

Tiga Camat Tak Koperatif, DPRD OKI Minta Bupati Evaluasi Kinerja



Rapat Paripurna DPRD OKI, Jumat (25/4/2025), dengan agenda laporan panitia khusus (Pansus) terhadap LKPJ Bupati OKI 2024. (ist)

OKI, BN - Tiga camat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mendapat sorotan tajam dari DPRD OKI karena dinilai tidak menunjukkan sikap koperatif dalam proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKI Tahun Anggaran 2024.

Ketiga camat tersebut adalah Camat Kayuagung, Camat Air Sugihan, dan Camat Pedamaran. Mereka dinilai abai terhadap undangan resmi DPRD, khususnya Pansus I yang membidangi urusan pemerintahan.

Dari total 18 kecamatan yang ada, hanya ketiga camat ini yang dua kali mangkir dari rapat penting bersama DPRD tanpa keterangan jelas. Fakta ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD OKI, Jumat (25/4/2025), dengan agenda laporan panitia khusus (Pansus) terhadap LKPJ Bupati OKI 2024.

Juru bicara Pansus I, Mustar Amd, menyampaikan keprihatinannya atas sikap ketidakpedulian para camat tersebut. Ia menilai hal ini sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. "Kami dari Pansus I sangat menyayangkan sikap tiga camat tersebut yang tidak hadir dalam dua kali undangan rapat resmi DPRD. Padahal, pertemuan ini penting untuk menggali informasi dan mengevaluasi capaian kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan dalam kerangka pertanggungjawaban kepala daerah," tegas Mustar.

Mustar juga secara tegas meminta Bupati OKI untuk melakukan evaluasi serius terhadap kinerja ketiga camat tersebut.

Lebih lanjut, DPRD melalui Pansus I menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Pembahasan LKPJ bukan semata-mata formalitas, melainkan instrumen penting untuk mengontrol kinerja pemerintahan dan memastikan program kerja berjalan sesuai visi dan misi daerah. (Nurlis)

Lima Desa di Bantaran Sungai Citanduy Berharap Penanganan Serius dari BBWS



Kepala Desa Pamotan (Asep Sujana)

PANGANDARAN, BN - Lima desa yang berada di sepanjang bantaran Sungai Citanduy, yakni Desa Pamotan, Kalipucang, Banjarharja, Cibuluh, dan Tunggilis, Kabupaten Pangandaran, menyuarakan keluhan terkait kondisi sungai yang kerap menyebabkan banjir di wilayah mereka. Para kepala desa telah menemui langsung pihak BBWS Citanduy dan PPK SDA OP 2, Bapak Yahya, untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi warganya.

Wilayah tersebut memang dikenal rawan banjir, yang berdampak langsung terhadap lahan pertanian dan aktivitas warga. Dalam pertemuan dengan BBWS, kelima kepala harapan bahwa penanganan akan segera dilaksanakan.

desa mendapat tanggapan positif dan dilaksanakan.

Kepala Desa Pamotan menyatakan harapannya agar pemerintah pusat melalui BBWS Citanduy segera merealisasikan solusi nyata di lapangan.

"Kami sangat berharap BBWS Citanduy bisa memberikan solusi secepatnya. Masyarakat, khususnya para petani, sudah terlalu sering terdampak banjir. Ini menyangkut mata pencaharian dan masa depan mereka," ujar Kepala Desa Pamotan.

PPK SDA OP 2 Bapak Yahya, dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar keluhan dari lima desa ini menjadi prioritas dalam program penanganan sungai tahun ini.

Masyarakat pun berharap, upaya ini tidak hanya berhenti pada janji, tetapi benar-benar direalisasikan demi keselamatan dan kesejahteraan warga di sepanjang bantaran Sungai Citanduy. (Asep Sujana)

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. H.T. Rizal Nudin Km. 7 Kompleks Perkantoran Pal IV Pijor Koling
Kota Padang Sidempuan 22733, Telp. Fax. (0634) 28941, email : kantah_psp@yahoocn.id

**PENGUMUMAN
(Tentang Sertipikat Hilang)**
Nomor : 5/2025

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No	NAMA/ ALAMAT PEMOHON	HAK ATAS TANAH, JENIS DAN NO. HAK	NIB	TERDAFTAR ATAS NAMA	TAROGAL PENGUKUAN	LETAH TANAH : a. Jalan b. Kelurahan c. Kecamatan d. Kota e. Luas	KETERANGAN
1	Nama : Andy Novrianto Simamora Alamat : JLMT Haryono Simamora Gg.Sekolah, RT/RW 003, Kel. Binuar, Kec. Padangsidimpua n Utara, Kota Padangsidimpua n	Hak Milik No. 00662/ Wek I	00313	Muhammad Akhir Simamora	11-06-2013	a. - b. Wek I c. Padangsidimpuan Utara d. Padangsidimpuan e. 108 M ²	- Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/02/1 1/2025/SPK T/POLRES PADANGSID IMPUAN/PO LDA SUMATERA UTARA tgl 27-02-2025 - Surat Pernyataan di Bawah Sumpah tanggal 23 April 2025

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan Pengganti Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Padangsidimpuan, 23 April 2025
Kepala Kantor Pertanahan
Kota Padangsidimpuan

Satrio Sediarsa Sagala, S.Si., S.H.
19780914 199703 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Reses II di AIL, Pimpinan DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto: Utamakan Kebutuhan Masyarakat



Pimpinan DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, SH, M, bersama Pengurus PAC dan Pengurus Ranting di Wisata AIL Rogojampi Banyuwangi. (ist)

BANYUWANGI, BN - Michael Edy Hariyanto, SH, MH dalam Reses II serap aspirasi masyarakat bersama Pengurus PAC, Pengurus Ranting se-wilayah Kabupaten Banyuwangi. Pimpinan DPRD Banyuwangi

wangi Michael Edy Hariyanto menjelaskan, "Terimakasih, hari ini kami bisa bersama Pengurus PAC, Pengurus Ranting dalam menampung aspirasi kebutuhan dan keperluan masyarakat masing-masing Desa di wilayah Kecamatan setempat, dan Pengurus PAC juga Pengurus Ranting sudah menampung semua kebutuhan masyarakat, utamanya pavingisasi, pengaspalan jalan, pembangunan plengsenan, di sektor irigasi pertanian, dan sektor pendidikan" jelasnya Michael juga selaku Ketua Partai Demokrat Banyuwangi kepada BN Jumat (9/5/2025).

"Harapan kami selaku Pimpinan DPRD Banyuwangi, semua aspirasi keinginan masyarakat dan Pengurus

PAC, Pengurus Ranting dapat terealisasi di tahun 2026, dan bersama anggota DPRD dari Fraksi Demokrat dalam serap aspirasi kebutuhan dan keperluan masyarakat dan sinergi, komunikasi, koordinasi dengan Pemkab. Banyuwangi, semoga segera terealisasi semua aspirasi kebutuhan masyarakat Banyuwangi" ujar Michael.

Awal kegiatan Reses II berlangsung di Wisata AIL juga diadakan sesi tanya jawab antara Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi dengan Pengurus PAC, Pengurus Ranting sampai selesai berjalan lancar. (Dj)

11 Program Prioritas Beltim Nyaman Masuk Dalam RPJMD



Bupati Beltim, Kamarudin Muten.

MANGGAR, BN - Seluruh program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Belitong Timur (Beltim) 'Beltim Nyaman' terakomodir dalam

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dalam waktu dekat, Rancangan RPJMD ini akan dibawa ke DPRD Beltim untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Sebanyak 11 program prioritas itu terdiri dari Jaminan Penunngkangan dan Pembayaran BPJS, Bantuan Kebutuhan Hidup, Insentif Umroh, Bantuan Tunai Majelis Taklim, 1.000 Beasiswa S1, Renovasi 1.000 Rumah, 10.000 Lapangan Kerja, Bantuan Modal untuk UMKM, Bantuan Bibit Sawit dan Pupuk, Bantuan bagi Nela-

yan serta Bantuan alat sekolah.

"Semua masuk dan sudah harus jalan di tahun ini," kata Bupati Beltim, Kamarudin Muten usai membuka Musyawarah Rencana Pembangunan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Beltim Tahun 2025 - 2029 di Ruang Gunung Lumut Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbangda), Selasa (6/5/2025).

Afa, sapan Kamarudin menyatakan khusus untuk Penunngkangan Pembayaran BPJS memang tidak bisa ditanggulangi lewat APBD Kabupaten Beltim. Namun

penunngkangan BPJS akan menggunakan dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR). "Yang pembayaran BPJS rutin bisa masuk. Yang tanggungan itu baru kita lewat CSR," jelas Afa.

Dari tanggungan BPJS sebanyak Rp7,8 milyar sebagian sudah terlunasi. Sinyanya, Pemkab Beltim akan meminta untuk dilakukan pemutihan. "Kan tanggungan itu harus bayar 25 bulan. Namun masyarakat Beltim gak usah khawatir, pakai KTP sudah bisa untuk berobat," ungkap Afa. (TP)

PPDB UPT SMPN 18 Menganti Dikeluhkan

Setahun BN Konfirmasi Tak Ditanggapi

GRESIK, BN - Tampak berjajar dan/atau bergerombol karyawan sekolah di area pos penjagaan, sesuai pengamatan awak media. Ditegur dan diarahkan oleh pihak keamanan sekolah bahwa adanya kegiatan sekolah yaitu ujian sekolah.

Bermotif (awak media) ingin lebih jauh mendalami Standar Operasional Sekolah (SOP) dengan mencoba langsung masuk dengan mengendarai kendaraan bermotor sebagai tujuannya adalah kelobi sekolah.

Mengingat kedekatan awak media dengan yang hampir seluruh personal penyelenggara pendidikan khususnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama Negri (SMPN) 18 Menganti, kabupaten Gresik.

Belum lagi ditambah atensi pada setiap bulannya oleh UPT SMP Negeri 18 terhadap keberadaan personal pers media dan/atau lembaga profesional media, sebagai catatan dari awak media adalah hal itu telah berlangsung selama lebih kurang belasan tahun.



UPT SMP Negeri 18 Menganti, Gresik (Foto: SA BN)

Memang lain dari pada kunjungan kerja awak media Cetak & Online BIDIKNASIONAL.com Senin/2/5/2025 dari yang sebelumnya, yakni dalam rangka konfirmasi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 atau tahun kemarin.

Terhitung hampir satu tahun, dan sangatlah janggal bila ikatan emosional yang terjalin selama ini melalui kontinuitas komunikasi yang telah terbangun selama belasan tahun antara awak media dan lembaga pendidikan

terhenti begitu saja, dengan berbagai alasannya.

Kepada pihak keamanan sekolah (satpam) awak media berharap dapat pernyataan resmi dari pihak UPT SMP Negeri 18 walaupun pernyataannya harus diwakili olehnya, yaitu konfirmasi tentang PPDB dengan biaya hingga Rp. 5 juta yang dikenakan oleh pihak sekolah terhadap calon peserta didik yang bernama dengan inisial S pada tahun ajaran 2024/2025. Redaksi BN berharap dapat menerima jawaban dari pihak sekolah. (SA)

Rangkaian HJB Ke-543, Bupati Rudy Susmanto Turut Kegiatan Run 2025 di Taman Budaya Sentul

BOGOR, BN - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, turut dalam kegiatan Bogor Run 2025 yang berlangsung meriah di Taman Budaya Sentul, Minggu (11/5/25). Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian perayaan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 dan menjadi wadah olahraga serta hiburan bagi masyarakat.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, khususnya Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bogor, atas terselenggaranya acara yang dinilai berhasil menyatukan masyarakat melalui olahraga.

"Bogor Run ini menjadi langkah awal kita untuk membuat event olahraga yang bisa menyatukan. Harapannya ke depan, kegiatan seperti ini bisa terus ditingkatkan



Bupati Bogor, Rudy Susmanto, saat ikut kegiatan Bogor Run 2025 di Taman Budaya Sentul, Minggu (11/5/25). (eml)

skalanya, bahkan hingga ke level nasional atau internasional," ujar Rudy.

Lebih lanjut, Rudy Susmanto berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin, tidak hanya sebagai ajang rekreasi, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.

"Setiap event yang kita selenggarakan harus mampu memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi di Kabupaten Bogor. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah hadir dan menikmati keindahan serta kebersamaan di Kabupaten Bogor hari ini," tambahnya. Dengan semangat Bogor Bareng, Pemkab Bogor terus berupaya menciptakan ruang-ruang publik yang produktif, sehat, dan inklusif melalui kegiatan-kegiatan inspiratif seperti Bogor Run 2025. (eml)

Jenazah PMI Meninggal di Kamboja Tiba di Rumah Duka, Bupati Banyuwangi Ipuk : Semoga Ini yang Terakhir



Kedatangan jenazah Rizal disambut isak tangis keluarga. (dj)

BANYUWANGI, BN - Setelah berbagai upaya dilakukan untuk memulangkan jenazah Rizal Sampurna, pekerja migran Indonesia (PMI) asal Banyuwangi yang meninggal di Kamboja, akhirnya sampai di rumah duka di Lingkungan Klatak, Kelurahan Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Senin (12/5/2025) dini hari. Kedatangan jenazah Rizal disambut isak tangis keluarga.

Jenazah Rizal diantarkan ke rumah duka antara lain oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Pemkab Banyuwangi, aktivis pekerja migran, dan pihak terkait lainnya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan duka mendalam. Ipuk berharap kejadian ini menjadi yang terakhir, dan tidak terulang kembali.

"Kami menyampaikan duka mendalam, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Terima kasih kepada KBRI Phnom Phen dan semua pihak yang turut membantu pemulangan jenazah. Kami berharap semoga kasus seperti ini menjadi yang terakhir, dan tidak terulang kembali," kata Ipuk.

Diketahui Rizal berangkat ke Kamboja secara non prosedural. Itulah yang membuat keberadaannya sempat sulit diketahui. "Kami berharap masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri, menggunakan jalur resmi yang telah ditetapkan pemerintah," tambah Ipuk.

Jenazah Rizal tiba sekitar pukul 03.00 WIB. Di rumah duka, kedatangan jenazah disambut oleh ibu, ayah, keluarga besar, dan warga setempat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba di rumah duka. Mereka tak kuasa menahan tangis. Sejak menerima informasi meninggalnya Rizal pada awal April, keluarga belum pernah menyaksikan jenazah Rizal.

Ibu Rizal, Sulastris, bersyukur jenazah Rizal akhirnya bisa dipulangkan. Ia akhirnya dapat menyaksikan wajah Rizal yang tersimpan dalam peti. "Alhamdulillah bisa pulang. Saya bersyukur," kata Sulastris.

Lebih dari sebulan Sulastris menantikan kabar tentang anaknya. Sejak pertama kali mendapat kabar meninggal dunia pada awal April, diketahui Rizal ternyata sudah meninggal sejak 17 Maret. "Terima kasih untuk semua yang membantu sampai (jenazah) anak saya bisa pulang," katanya.

Sebelumnya Pemkab Banyuwangi terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait soal pemulangan jenazah Rizal. Komunikasi intens dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan KBRI terus dilakukan.

Biaya pemulangan jenazah Rizal awalnya akan dibiayai penuh oleh Pemkab Banyuwangi. Namun dalam perjalanan prosesnya KBRI Phnom Phen berhasil membuat nota diplomatik kepada kepolisian Kamboja, dan berhasil meminta pertanggungjawaban perusahaan pemberi kerja untuk membiayai pemulangan jenazah.

Jenazah lalu dipulangkan dari Phnom Penh menuju Jakarta. Dilanjutkan dari Jakarta menuju Bandara Juanda Surabaya. Proses dan biaya dari Juanda Surabaya menuju rumah duka difasilitasi oleh Pemkab Banyuwangi. (Dj/edy)

Wakil Bupati Asahan Lepas 3 Peserta Magang ke Jepang



Wakil Bupati Asahan, Rianto, saat melepas 3 peserta program magang kerja ke Jepang. (tp)

ASAHAN, BN - Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., MAP melepas 3 peserta program magang kerja ke Jepang sekaligus menyerahkan sertifikat pelatihan kepada yang telah menyelesaikan pelatihan. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara LPK Shin Megumi Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Asahan. Senin, (28/04/2025).

Wakil Bupati Asahan menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Asahan. "Mari kita dukung dan apresiasi upaya Kerjasama Pemkab Asahan dalam hal ini dibantu pihak Disnaker dengan LPK Shin Megumi Indonesia dalam meningkatkan kualitas SDM melalui program kerja magang ke Jepang," ujarnya saat menerima kunjungan LPK Shin Megumi Indonesia.

Wabup yang didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan juga berpesan kepada peserta magang untuk tetap semangat dalam bekerja, jaga sopan santun dan attitude dalam bekerja. Dengan demikian, diharapkan para peserta magang dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan di Jepang dan membawa pengalaman berharga untuk diterapkan di tanah air.

Sementara itu, pimpinan LPK Shin Megumi, Rudi Hari Sandi menyampaikan informasi tentang program kerja magang ke Jepang. "Kami berharap program ini dapat menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya untuk mengejar peluang yang lebih baik di masa depan. Ayo, anak muda Asahan, ikuti jejak mereka untuk mencapai kesuksesan dan masa depan yang lebih cerah," ucap Rudi. (T.P)

Bupati Dukung Penuh Pelantikan Pengurus MUI Kabupaten Lampung Barat



Bupati Lampung Barat, Hi. Parosil Mabsus, saat menerima audiensi jajarannya MUI Lampung Barat di ruang kerjanya, Senin (5/5/2025). (taufik)

LAMPUNG BARAT, BN - Bupati Lampung Barat, Hi. Parosil Mabsus, menyatakan dukungan penuh terhadap pelantikan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Barat yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Hal tersebut disampaikan Parosil dalam audiensi bersama jajaran MUI

Lampung Barat yang berlangsung di ruang kerjanya, Senin (5/5/2025).

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MUI Kabupaten Lampung Barat, Pairozi, yang memaparkan agenda dan persiapan pelantikan kepengurusan baru MUI yang dijadwalkan akan berlangsung pada 14 Mei 2025 mendatang di Aula Kagungan, kantor bupati setempat.

Dalam kesempatan itu, Pairozi menyampaikan bahwa pelantikan tersebut akan dihadiri oleh Ketua MUI Provinsi Lampung yang juga dijadwalkan untuk melantik secara langsung jajaran pengurus baru.

"Rencana kita akan melakukan pelantikan kepengurusan MUI di wilayah Kabupaten Lampung Barat pada 14 Mei nanti. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah daerah," ujar Pairozi.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Parosil Mabsus menyambut baik inisiatif dan agenda yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan mendukung penuh kegiatan pelantikan tersebut, bahkan memastikan akan hadir langsung dalam acara sebagai bentuk apresiasi terhadap peran MUI di tengah masyarakat. (taufik)

Proyek Hotmix ...

kasi dan tidak sesuai dengan RAB.

Awal pengerjaan saat pengerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) diduga tidak adanya lantai kerja, hal ini terlihat jelas pada saat pengerjaan. Air dan lumpur begitu banyak, hal ini diperkuat dengan pengakuan pekerja kalau lantai kerja tidak di kasih pasir.

"Air di sedot dengan menggunakan diesel, setelah air agak berkurang kemudian batu besar di tata tanpa adanya lantai kerja atau pasir, habis di tata terus di kasih adukan/luluh," ujar pekerja.

Selain itu pemasangan batu untuk TPT juga sedemikian rupa, sehingga masih banyak celah rongga (batu yang di pasang berukuran besar), tanah urug yang di pakai pemadatan tepian jalan raya juga tanah hasil galian TPT tersebut.

Adanya dugaan mark up anggaran dengan mengurangi Spesifikasi (Campuran pasir dan semen), hal ini diperjelas dengan temuan tim media di lokasi, luluh yang sudah kering bisa dikelupas dengan tangan, itu jadi pertanda kalau adukan tersebut campuran semennya dikurangi.

Dengan adanya kejang-galan pada pembangunan proyek tersebut tim investigasi mendatangi kantor CV

pelaksana sesuai dengan yang dicantumkan di papan informasi kegiatan.

Saat di kantor CV yang dimaksud, tim investigasi BN ditemui oleh staf administrasi yang belakangan diketahui bernama Dewi.

Saat dikonfirmasi Dewi mengatakan, "terima kasih atas kedatangan bapak bapak semua, klarifikasi dan konfirmasi dari bapak bapak buat evaluasi kinerja kami," ucapnya pada Jum'at (14/03/25).

"Lebih jauh dikatakan oleh Dewi, yang jelas dalam pengerjaan kami sudah sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.

Lanjut Dewi, "Silahkan konfirmasi ke dinas saja untuk lebih jelasnya," ucapnya. Setali tiga uang, baik Dinas PUPR Jombang juga terkesan seperti tidak tahu menahu atau terkesan tutup mata. Hal itu menurut sumber yang memberikan informasi, ada salah satu pejabat di Dinas PUPR Jombang ini diduga masih punya hubungan keluarga dengan pemilik CV. mungkin juga dengan orang kepercayaan nya (Dewi) Jadi jangnan heran kalau masalah pengerjaan proyek hotmix, CV Dea Prima Celfinta selalu menang dalam tender proyek jalan hotmix jika melalui sistem E-Purchasing / E-Katalog.

Jadi sampai saat ini pihak PUPR agak segan menyikapi soal CV. Media Prima Konsultan.

Sementara itu masih menurut Dewi, "Silahkan menghubungi mandor saja, karena mandor yang berada di lokasi," ucap Dewi.

Menurut sumber BN, si Dewi ini pintar berbalasan mengalihkan perhatian ke mandor, padahal dia lah yang dipercaya oleh pemilik CV, bukan mandornya, tujuannya hanyalah supaya aman tanpa beban jadi pertanyaan oleh si wartawan.

Kembali lagi pada masalah proyek tersebut, ada dugaan kuat pada proyek jalan hotmix tersebut ada kejanggalan pada pelaksanaan awal pembangunan ketika itu. Jika proyek itu memang Sekarang proyek tersebut selesai di kerjakan, diduga ada yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, bahkan diragukan jika kualitasnya nanti buruk.

Bahkan ketika itu terlihat pada pasangan batu TPT, sebelum di kerjakan lapisan dasar, seharusnya di kasih lantai kerja yaitu pasir, setelah itu batu di tata kemudian di kasih luluh. Tetapi untuk luluh atau campuran adukan, diduga kuat juga ada unsur semennya di kurangi. Selain itu pada urukan awal tanah urug sebenarnya menggunakan tanah urug

Sambungan hal 1

yang baru, bukan tanah hasil galian TPT (tanah sawah), apa itu sudah sesuai dengan RAB?

Juga pada pemasangan PL Batu juga terkesan besar besar dan ada indikasi batu dari bangunan yang lama di pasang kembali. Selain itu patut di pertanyakan, "terkait pembelannya dimana, kalau memang benar pembelannya dari galian ilegal, bisa di katakan CV tersebut sebagai penadah galian ilegal," ujar nya.

Sementara informasi yang diterima BN bahwa proyek jalan Mojoagung-Mojoduwur tendernya di lakukan dengan sistem E-Katalog (E-purchasing), kalau tendernya Melalui sistem E-Katalog patut di curigai, apakah ada permintaan kotor terkait pengondisiannya sebagai pemenang?

Perlu untuk diketahui, pada permasalahan konstruksi tidak jarang menjadi indikator adanya penyimpangan, perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi termasuk penyimpangan tindak pidana korupsi. Tingginya kasus korupsi pada pengadaan dan pelaksanaan proyek konstruksi menjadi latar belakang dan harus dilakukan penyelidikan oleh aparat hukum. (Bersambung Edisi Berikutnya/tim)

Sita Uang Korupsi Rp 479 M Duta Palma, Wakil Ketua Komisi III Apresiasi Kejagung



Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (ist)

JAKARTA, BN -Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang sebesar Rp 479,1 miliar dari PT Darmex Plantations yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang terkait korupsi di PT Duta Palma Group.

"Apresiasi Kejagung yang jeli dalam menyita aset kejahatan korupsi sampai ratusan miliar ini. Kalau sebulan ada dua kali saja penyitaan seperti ini, sudah lumayan besar pemasukan buat negara. Jadi kalau menurut saya, sering-seringlah para penegak hukum melakukan penyitaan begini," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (12/5/2025).

Ke depannya, Sahroni meminta Kejagung untuk fokus dalam mengembalikan kerugian negara, terutama dari kasus-kasus korupsi kakap. "Apalagi kejahatan korporasi yang selalu menimbulkan kerugian fantastis bagi negara. Maka penyitaan asetnya juga harus bisa fantastis. Jadi selain pidana badan bagi para pelaku, Kejagung harus bisa follow the money untuk tutupi kerugian negara yang ditimbulkan. Itu baru top," ungkap Sahroni.

Sebelumnya, Kejagung menyita senilai Rp 479 miliar atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh terdakwa korporasi PT Darmex Plantations. Uang tersebut terkait dengan tindak pidana asal yaitu korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group.

Penyidik Kejagung awalnya mendapatkan informasi uang tersebut hendak dilarikan ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Uang tersebut rencananya dikirim melalui dua anak usaha PT Darmex Plantations, yakni PT Delimuda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa, yang masing-masing bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit. (sumber : investor.id/red)

Miss Indonesia ...

Sambungan hal 1

"Sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum mengembalikan uang yang telah diterima," kata Abdul Qohar, Direktur Penyidikan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), saat jumpa pers di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Mei 2025

Qohar mengatakan, tim jaksa penyidik sedang menelusuri penggunaan uang tersebut. Menurut keterangan Asyifa, uang tersebut adalah titipan untuk membeli barang. "Tapi penyidik tidak hanya percaya dari itu. Kami terus kembangkan, sebenarnya uang itu untuk apa?" ujarnya. Sebelumnya, Asyifa diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) periode 2018-2023. Selain Asyifa, penyidik juga memeriksa delapan saksi lainnya pada Jumat, 2 Mei 2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan penyidik memeriksa Asyifa dan delapan saksi lainnya secara terpisah. "Tadi ada miskomunikasi dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Asyifa diperiksa hari ini," kata Harli kepada Tempo lewat sambungan telepon, Jumat, 2 Mei 2025.

Harli mengatakan Asyifa diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya selaku Senior Officer External Comm Media PT Pertamina International Shipping. Asyifa diduga mendapatkan aliran dana dari Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Gading merupakan salah satu tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina. "Diduga menerima aliran dana dari GRJ," kata Harli. Meskipun demikian, Harli menyatakan status Asyifa masih sebagai saksi.

Selain Asyifa, penyidik Kejaksaan Agung juga memeriksa AB (VP Crude & Product Trading & Commercial), WB (Direktur PT Chevron Pacific Indonesia); SA (Manager Tonnage Management PT Pertamina International Shipping); dan MG (Manager Treasury PT Pertamina International Shipping), RP (Staf PT Pertamina International Shipping); HASM (VP Crude & Gas Operation PT Pertamina International Shipping tahun 2021-2023); AS (VP Tonnage Management & Service PT Pertamina International Shipping tahun 2022-2023); hingga ATW (Staf Crude Trading ISC Pertamina).

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka, enam di antaranya merupakan pejabat anak perusahaan Pertamina. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS); Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firmandi (YF); Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS)

Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono (AP); Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya (MK); dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne (EC).

Ada pula tiga broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (sumber : tempo.com/red)

Tahan Tersangka ...

Sambungan hal 5

oleh seorang pria berinisial LU tersebut, sudah sejak tahun 2023 lalu dengan bukti laporan polisi nomor LP/B/240/VI/2023/SPKT/POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH atas dugaan pelanggaran Pasal 351 KUHP, "Saya harap penegak hukum yang menangani kasus ini berlaku objektif dan memberikan hukuman sesuai hukum yang berlaku," imbuhnya

Sementara itu Kasi Pidum Kejari Semarang Sarwanto, SH, MH, saat dimintai keterangan Wartawan di Kantor Kejari Semarang, Rabu (30/4) menyampaikan, "Jadi, hari ini Rabu (30/4) sekira pukul 11.00 WIB, dilaksanakan penyerahan Tersangka dengan barang bukti dari Penyidik Polrestabes Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nama perkara Lutfi Ulinuha. Kami melakukan penahanan terhadap Tersangka 20 hari kedepan," jelas

"Alasan kami melakukan penahanan, secara normatif agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti yang sah dan lain sebagainya," imbuhnya. Pasal yang disangkakan kepada Tersangka, lanjut Sarwanto, yaitu disangkakan pasal 351 ayat 1 KUHP terkait penganiayaan. Ditanya terkait upaya damai dari kedua belah pihak yang berperkara, Kasi Pidum Kejari Semarang Sarwanto menyatakan, diduga dan dimungkinkan susah jika dilakukan upaya damai. "Melihat penanganan perkara ini, kemungkinan kedua belah pihak susah melakukan upaya damai. Berkaitan dengan ini, kalau belum ada upaya damai, tidak memenuhi syarat untuk RJ (Restoratif Justice). Kami limpahkan ke Pengadilan. Tersangka ditahan di Rutan Kelas 1 dr Cipto (Jalan dr Cipto, Kota Semarang)," ungkapnya.

Dijelaskan Kasi Pidum, berkas barang bukti yang sah, yang diterima Kejari dari Penyidik Polrestabes Semarang berupa hasil visum, rekaman video CCTV dan keterangan saksi-saksi terhadap Korban di sebuah rumah yang berada di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang

Saat ditanya Wartawan terkait dampak luka-luka penganiayaan yang dialami korban LRSN, Sarwanto mengungkapkan jika korban mengalami beberapa luka di beberapa bagian tubuhnya. "Itu ada memar pada bahu kiri, kemudian lengan kanan atas, punggung tangan kanan dan paha kanan dekat lutut. Kemudian lecet pada jari, luka robek tipis pada dada kiri dekat tangan," pungkasnya. (Peni)

Rapat Paripurna ...

Sambungan hal 7

LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024, Rudy Susmanto menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas perhatian dan kontribusi DPRD dalam proses pengkajian dan pembahasannya.

"LKPJ Tahun 2024 merupakan laporan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD secara serius bersama perangkat daerah dan BUMD, sebagai acuan dalam menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan," tambah Rudy.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor menegaskan pentingnya konsolidasi, koordinasi, dan kerja sama lintas sektor untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan efektif dan inklusif. Ia juga menekankan bahwa DPRD adalah mitra sejajar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. (eml)

Kasek SMAN 1 ...

Berdasarkan informasi itu BN segera klarifikasi kebenarannya datang ke SMA Negeri 1 dan bertemu Dyah Ayu Endrianingsih, S.Pd, MM, selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Jombang.

Selanjutnya Kepala sekolah mengatakan "Saya akui memang di SMA Negeri 1 Jombang ini ada pungutan tapi berupa sumbangan. Sumbangan itu pun buat kebutuhan sekolah, suatu misal ada kegiatan tambahan," ujarnya.

Budiono selaku ketua MKKS SMA mengatakan, "Uang gedung dan SPP itu sebenarnya tidak ada, tapi di kemas dengan nama sumbangan," ujar Budiono.

Jika dicerna isi dari pernyataan Ketua MKKS SMA Budiono, dia seakan menutupi apa yang terjadi dengan

adanya pungli di sekolah sekolah SMAN Jombang, begitu juga dengan UPT Diknas Provinsi Jatim, seakan mereka tutup mata. Pertanyaan, apakah mereka dapat cipratan "Uang haram" dari masing masing SMAN yang ada di jombang yang diduga lakukan pungli?

Dalam peraturan pemerintah sudah di jelaskan baik pengajar maupun Komite di larang memungut sepeser pun dari siswa. Sumbangan pun harus bersifat sukarela dan tidak harus dipaksakan, kalau uang gedung Rp 2,5 juta dan iuran Rp 150 ribu perbulan itu sama saja dengan pungutan liar.

Pungutan liar (pungli) di sekolah diatur oleh beberapa peraturan, di antaranya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Khususnya pasal 12 huruf b, pasal ini dengan tegas melarang komite sekolah melakukan pungutan, baik secara kolektif maupun perorangan dari peserta didik maupun orang tua/walinya.

Jika Kepala Sekolah SMAN 1 Jombang diduga terlibat dalam Pungli? Setidaknya pihak UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Cabang Jombang, atau Kanwil Dinas Pendidikan Provinsi Jatim memberikan sanksi tegas kepada Kepala sekolah SMAN 1 Jombang karena diduga terlibat dalam "Pungli" di sekolahnya nya yang ia pimpin.

Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 juga melarang

Sambungan hal 1

pendidik dan tenaga kependidikan melakukan pungutan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaku pungli bisa dipidana. Pelaku pungli bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP yang mengatur tentang pemerasan, atau Pasal 423 KUHP jika pelaku nya pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya. Selain itu pungli juga biasa di anggap sebagai tindak pidana korupsi, terutama jika dilakukan oleh pejabat atau aparatur sipil negara.

Sementara UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur hukuman pidana bagi pelaku pungli, seperti yang diatur dalam Pasal 12E dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. (Tok)

Sambungan hal 1

sesuai penggunaannya, terkait dengan laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Menurut sumber BN oknum di dinas tersebut memilih media yang menguntungkan perut mereka. "Saya dapat info mereka terima upeti dalam bentuk casback tunai, jadi tidak ada jejak digitalnya," kata sumber itu. (Bersambung edisi berikutnya/Tok)

Anggaran Kegiatan ...

Selain itu info yang diterima BN, "Untuk anggaran keamanan sudah di anggarkan oleh Disporapar Jombang, desa setempat juga ikut membantu soal anggaran keamanan," ungkap warga setempat.

Sementara, dari data yang diperoleh BN menunjukkan, Penyediaan promosi melalui media cetak dan media online (media pro-

mosi) Rp 27.000.000,-
- Belanja jasa iklan, reklame, film dan pemotretan (media pemuda pelopor) Rp 5.000.000,-
- Belanja publikasi media cetak, online UP Rp 37.000.000,-
- Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan (multi Event) Rp 49.500.000,-
- Belanja jasa iklan /

reklame, film dan pemotretan (permasalahan olah-raga) Rp 10.000.000,-
- Belanja jasa iklan/reklame (olah raga tradisional) Rp 2.500.000,-
- Penyediaan promosi melalui media sosial Rp 48.000.000,
- Belanja jasa iklan/reklame Rp 8.000.000,-
Pertanyaannya, apakah anggaran tersebut sudah

Sambungan hal 1

Terhadap tersangka EBS, dijerat dengan dua pasal. Yakni Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Lalu Kedua, pasal 3 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Kami akan terus mendalami peran masing-masing tersangka dan menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat," pungkasnya. (Teddy Syah Roni)

Direktur PT ...

penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, menetapkan seorang pengembang sebagai tersangka baru.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo, John Franky Yanafia Ariandi menjelaskan, tersangka berinisial EBS merupakan Direktur sekaligus pengembang dari PT Kembang Kenongo Property. Ia diduga terlibat dalam pembelian tanah cuilan milik Pemerintah Desa Sidokerto yang seharusnya tidak untuk diperjualbelikan.

"EBS menjalani pemeriksaan selama 7 jam saat masih sebagai saksi. Kemudian diperiksa lagi selama 1,5 jam setelah statusnya dinaikkan sebagai tersangka," ungkapnya,

Kamis (8/5/2025) malam.

Franky menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan secara intensif. Gelar perkara juga telah dilakukan, dan hasilnya ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan EBS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. "Dari hasil gelar perkara, kita temukan peran EBS selaku pembeli dan pengembang dalam proyek tersebut. Ia diduga kuat mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan aset desa yang tidak boleh dialihkan secara sembarangan," imbuhnya.

Selanjutnya, EBS juga diduga menggunakan lahan hasil transaksi tersebut untuk kepentingan komersial. Ia membangun kawasan perumahan bernama Griyo Sono Indah di atas tanah TKD yang diperoleh

secara melawan hukum.

"Oleh tersangka dipergunakan untuk membangun perumahan, bernama Griyo Sono Indah. Secara melawan hukum," tegas penyidik.

Perlu Diketahui sebelumnya, penyidik juga telah menahan tiga tersangka lain, masing-masing berinisial AN, SMN, dan KSN. Ketiganya diketahui merupakan Kepala Desa Sidokerto dan anggota dari Tim 9 yang bertugas dalam pengelolaan aset desa. Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 3.141.100.000. Uang tersebut berasal dari hasil transaksi ilegal atas aset desa yang seharusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Meriahkan HUT OKU Timur, Bupati Gelar Drag Bike

□ Ir. Lanosin, ST, MT, MM : Kami Harapkan Lahir Bibit-bibit Pembalap Berbakat Dari OKU Timur

OKU TIMUR, BN - Dalam rangka HUT Kabupaten Ogan Komering Olu Timur (OKU Timur), Bupati Ir. Lanosin, ST, MT, MM, secara resmi membuka gelaran Drag Bike (balap motor fokus dengan kecepatan dan akselerasi pada lintasan lurus), di Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Sabtu 3 Mei 2025. Acara ini disambut antusias oleh para pecinta Drag Bike (balap motor) dan masyarakat setempat.

BUPATI Enos panggilan akrab Lanosin dalam sambutannya menyampaikan harapan agar event ini dapat menjadi wadah bagi para pembalap untuk menunjukkan kemampuan dan sportivitasnya.

"Semoga event ini dapat berjalan lancar dan sukses, serta dapat melahirkan bibit-bibit

pembalap berbakat dari OKU Timur," ujarnya.

Balap motor ini diikuti oleh ratusan peserta dari warga setempat dan kabupaten tetangga. Para peserta memperebutkan hadiah menarik dan gelar juara di berbagai kelas yang

dipertandingkan.

Ketua panitia pelaksana Kadin PUTR

Aldi Gurlanda, ST, MT, menyampaikan Alhamdulillah Syukur kita

pagi hari ini dipertemukan dalam kegiatan Champion Drag

kami punya ide kejuaran Drag Bike ini, berasal dari maraknya komplek

pengaduan masyarakat tentang adanya balap liar di wilayah belintang dan Martapura. Kami berharap dengan diadakan event ini dapat menyalurkan kebiasaan anak muda dan teman-teman yang kurang baik di jalan raya, Semoga dengan enven champion Drag Bike ini generasi muda di OKU Timur umumnya Sumatera selatan dapat berprestasi dikalahkan yang lebih tinggi," jelasnya.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati OKU Timur H.M. Adi Nugraha Purna Yudha, SH, Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur Hermanto, SE, Ketua KNPI OKU Timur M. Rofizul Yanmarta, SH, Ketua IMI SumSel Alfian Maskoni serta warga Pecinta Otomotif.

(Nelis Sri wahyuni/adv)



Berbagai momen kegiatan Drag Bike (balap motor fokus dengan kecepatan dan akselerasi pada lintasan lurus), di Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Sabtu 3 Mei 2025. Acara yang dibuka Bupati Ir. Lanosin, ST, MT, MM, ini disambut antusias oleh para pecinta Drag Bike dan masyarakat setempat. Tampak berbagai momen bupati, Kadin PUTR Aldi Gurlanda, ST, MT, Kapolres OKU Timur AKBP Kevin Leleury, SIK, M.Si, Wakil Bupati OKU Timur H.M. Adi Nugraha Purna Yudha, SH, Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur Hermanto, SE, Ketua KNPI OKU Timur M. Rofizul Yanmarta, SH, Ketua IMI SumSel Alfian Maskoni seta masyarakat tampak antusias dalam acara tersebut. (ist)

